

**PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN, DAN UPAH MINIMUM  
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013-2015  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**Nama : Arfan Ridhoni**

**NPM : 1451010156**

**Program Studi: Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440H/2018M**

**PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN DAN UPAH MINIMUM  
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013-2015  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi**



**Oleh  
ARFAN RIDHONI  
NPM. 1451010156**

**Program Studi : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : A. Zuliansyah, M.M  
Pembimbing II : Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1440H/2019**

**MPENGARUH PDRB, PENGANGGURAN, DAN UPAH MINIMUM  
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013-2015  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  
ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Penduduk miskin di Provinsi Lampung meningkat pada tahun 2015, penduduk miskin di Provinsi Lampung tahun 2015 sebesar 1.163.500 jiwa sedangkan pada tahun sebelumnya atau tahun 2014 masih sebesar 1.143.930 jiwa. Angka Pengangguran yang berfluktuatif serta Upah Minimum dan PDRB yang meningkat setiap tahunnya seharusnya mampu mengurangi penduduk miskin di Provinsi Lampung.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah terdapat pengaruh produk domestik regional bruto, pengangguran, dan upah minimum secara parsial dan simultan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2013-2015? Bagaimana kemiskinan kabupaten/kota provinsi lampung dalam perspektif ekonomi islam?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS Provinsi Lampung dalam periode pengamatan 2013-2015, data yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu: produk domestik regional bruto, pengangguran, upah minimum dan kemiskinan tahun 2013-2015, yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa secara simultan (Uji F) produk domestik regional bruto, pengangguran dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2015, secara parsial (Uji T) produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di provinsi lampung tahun 2013-2015, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di provinsi lampung tahun 2013-2015, upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2015. Perspektif Islam mengenai kemiskinan kabupaten/kota di provinsi lampung, dalam kegiatan berekonomi kurangnya Pemerintah menjalankan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Pemerintah hanya berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Pada zaman Rasulullah orang-orang miskin memperoleh bantuan materi dari kas negara yang ditangani secara profesional dan Al-Quran juga menyerukan agar orang-orang kaya membantu orang miskin karena dalam harta kekayaan orang kaya ada hak orang miskin.

**Kata kunci : PDRB, Pengangguran, Minimum dan Tingkat Kemiskinan**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN, DAN  
UPAH MINIMUM TERHADAP TINGKAT  
KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013-2015  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**NAMA : ARFAN RIDHONI**  
**NPM : 1451010156**  
**PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**A. Zuliansyah, S.Si., M.M.**  
**NIP. 198302222009121003**

**Pembimbing II**

**Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak**  
**NIP.**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Madnasir, S.E., M.S.I.**  
**NIP. 19750424002121001**



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jalan Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN, DAN UPAH  
MINIMUM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013-2015 PERSPEKTIF EKONOMI**

**ISLAM** disusun oleh **Arfan Ridhoni, NPM : 1451010156 Jurusan Ekonomi**

**Syariah**, telah diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

Jum'at, 28 Desember 2018.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang : **Madnasir, S.E., M.S.I** (.....)

Sekretaris : **Dinda Fali Rifan, M.Ak** (.....)

Penguji I : **Syamsul Hilal, M.Ag** (.....)

Penguji II : **A. Zuliansyah, M.M** (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag**  
NIP. 195808241989031003

## MOTTO

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾

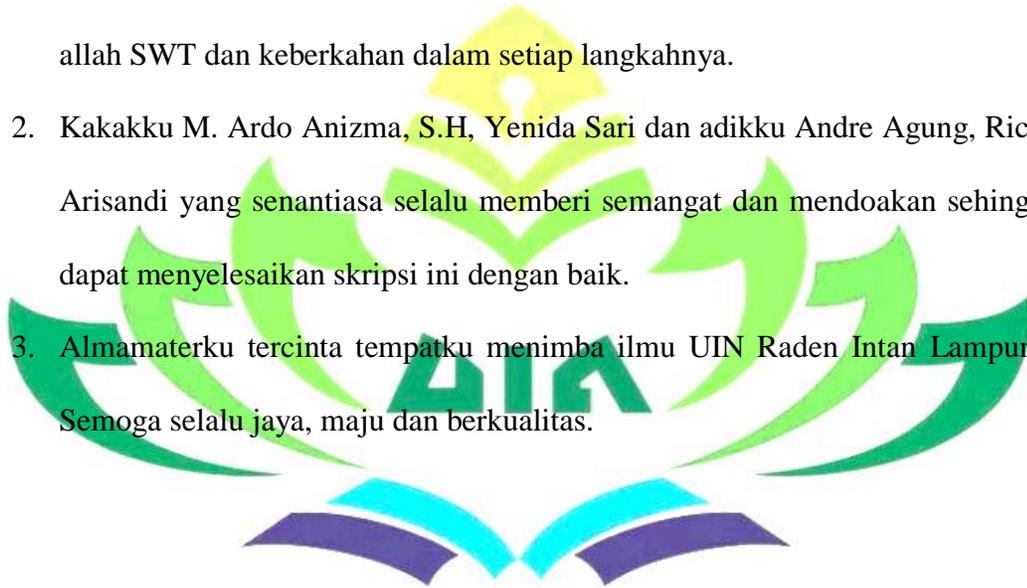
*“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S Al-Isra : 26)*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulis skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Nizar Agung, S.H dan Ibu Maryana yang aku hormati dan aku banggakan, selalu menguatkanmu sepenuh jiwa raga, merawatmu, memotivasi dengan nasehat-nasehat yang luar biasa serta mendoakanku agar selalu dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Kakakku M. Ardo Anizma, S.H, Yenida Sari dan adikku Andre Agung, Ricky Arisandi yang senantiasa selalu memberi semangat dan mendoakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Arfan Ridhoni, dilahirkan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 02 Mei 1996. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Nizar Agung, S.H. dan Ibu Maryana. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu SD Negeri 3 Gapura pada Tahun 2008, lalu melanjutkan studi ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kotabumi pada Tahun 2008 lulus pada Tahun 2011, setelah itu melanjutkan ke jenjang sekolah atas di SMA Negeri 4 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2014.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur UM-PTKIN atau jalur tes pada Tahun 2014.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“pengaruh PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 Perspektif Ekonomi Islam”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan Kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya karena menyelesaikan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Penulis secara rinci mengungkapkan terimakasih kepada:

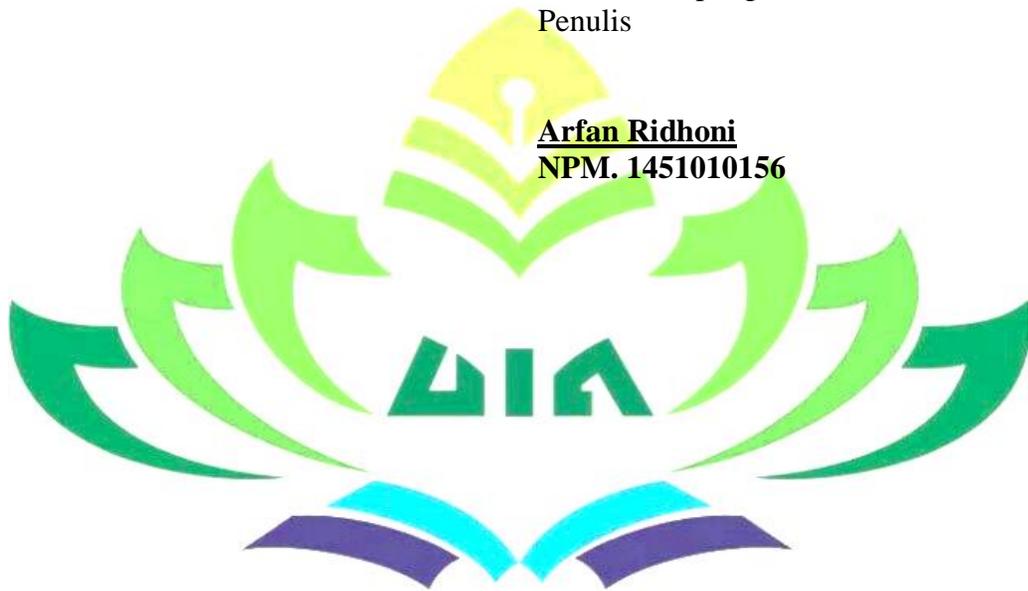
1. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si. selaku ketua jurusan dan Deki Fermansyah, S.E., M.M selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam yang selalu memberikan arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. A. Zuliansyah, S.Si., M.M selaku pembimbing I yang senantiasa sabar dan meluangkan banyak waktu untuk memberikan motivasi dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Yulistia Devi, S.E., M.S.Akt selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan banyak waktu serta senantiasa sabar untuk memberikan motivasi dan pengarahan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Bandar Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data dan referensi.
7. Sahabatku Indra Wijaya, Redhi Nopriandi Gustam, S.IP Ridho Al Akbar Gustam, S.T.P yang senantiasa selalu ada memberikan dorongan, semangat, motivasi selama 8 tahun ini.
8. Sahabatku yang membantu dan memberikan semangat serta motivasi, Atika Adi Rekayasa Mayasa, S.E, Desti Septiyani, S.E, Deswandi, S.E, Gagas Prabowo, S.E, Ike Febriyani, S.E, M. Yunus Azhar, S.E, M. Farouky Wildinata, S.E, Meutia Resky Oisina, S.E, Sultan, S.E terimakasih untuk semangat dan doa kalian.
9. Teman seperjuangan khususnya kelas F dan kelas A jurusan Ekonomi syari'ah angkatan 2014 yang selalu bersama selama perkuliahan serta memberikan semangat.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dan dan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keIslaman di abad modern.

Bandar Lampung, Desember 2018  
Penulis

**Arfan Ridhoni**  
**NPM. 1451010156**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah.....	16
E. Rumusan Masalah .....	16
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	

A. Produk Domestik Regional Bruto.....	18
1. Pengertian PDRB.....	20
2. Metode Perhitungan PDRB .....	21
3. Hubungan PDRB Dengan Kemiskinan .....	23
4. PDRB Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	25
B. Pengangguran .....	27
1. Pengertian Pengangguran .....	28
2. Jenis dan Bentuk Pengangguran .....	30
3. Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan.....	32
4. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	33
C. Upah Minimum.....	35
1. Dasar Hukum Upah Minimum .....	36
2. Pengertian Upah Minimum .....	38
3. Hubungan Upah Minimum Dengan Kemiskinan .....	39
4. Upah Minimum Dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	41
D. Kemiskinan.....	45
1. Pengertian kemiskinan.....	46
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan.....	47
3. Ukuran Kemiskinan .....	49
4. Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	49
E. Kajian Pustaka .....	53
F. Kerangka Berpikir Penelitian .....	57
G. Hipotesis .....	59

### **BAB III METODOLOGI**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	62
B. Jenis dan Sumber Penelitian.....	63
C. Teknik dan Pengumpulan Data .....	64
D. Populasi dan Sampel .....	65

E. Definisi Operasional Variabel.....	66
F. Metode Analisis Data.....	68

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	74
B. Gambaran Penelitian.....	78
C. Analisis Data.....	83
1. Uji Asumsi Klasik.....	83
a. Uji Normalitas.....	83
b. Uji Multikolinieritas.....	84
c. Uji Atokolerasi.....	85
d. Uji Heteroskedastisitas.....	86
2. Analisis Regresi Berganda.....	87
3. Hasil Uji Hipotesis.....	88
a. Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	88
b. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T).....	90
c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	92
D. Pembahasan.....	93
1. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.....	93
2. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.....	95
3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.....	96
4. Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015..	97

5. Bagaimana Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	98
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	105

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1.1 Data Jumlah Penduduk dan penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.....	13
1.2 Data Persentase PDRB, Pengangguran, Upah Minimum, dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2014 (Persen).....	14
1.3 Data Persentase PDRB, Pengangguran, Upah Minimum, dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2015 (Persen).....	14
3.1 Daftar Operasional Variabel .....	67
4.1 Daftar Nama Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan.....	78
4.2 Data Jumlah Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 (Jiwa).....	79
4.3 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 (Rupiah) .....	80
4.4 Data Penduduk Usia 15+ Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 (Jiwa) .....	81
4.5 Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 (Rupiah).....	82
4.6 Hasil Uji Multikolinieritas .....	85
4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	86
4.8 Heterokedastisitas Hasil Uji Park.....	86
4.9 Uji Regresi Linier Berganda .....	87
4.10 Hasil Uji F.....	89

4.11 Hasil Uji T.....	91
4.12 koefisien determinasi ( $R^2$ ).....	92



## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir.....	59
4.1 Hasil Uji Normalitas .....	84



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Jumlah Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.
3. Data Penduduk Usia 15+ Yang Termasuk Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.
4. Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015
5. Data Olahan Eviews
6. Sk Pembimbing
7. Kartu Konsultasi Skripsi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini maka penulis merasa untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam “**Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 Perspektif Ekonomi Islam**”. Dengan adanya penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. **PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)** adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.<sup>82</sup>
2. **Pengangguran** adalah orang yang ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja, namun tidak mendapatkannya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup><http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf>, (terakhir diakses 02 Februari 2018).

<sup>83</sup>Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hlm. 276.

3. **Upah Minimum Provinsi** adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya<sup>84</sup>
4. **Kemiskinan** adalah salah satu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok.<sup>85</sup>
5. **Ekonomi Islam** adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang penerapannya dengan nilai-nilai Islam.<sup>86</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Lampung Tahun 2013-2015 Perspektif Ekonomi Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Objektif**

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul di skripsi, hal ini karena adanya kesenjangan antara teori dan praktek. Kenaikan PDRB, menurunnya angka pengangguran, dan

---

<sup>84</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

<sup>85</sup>Lincoln arsyat, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, 2015) hlm. 299.

<sup>86</sup>Mustafa Edwin Nasution et. Al, *"Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam"* cet 3, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010) hlm. 15.

meningkatnya upah minimum setiap tahunnya seharusnya dapat mengurangi angka kemiskinan. Badan pusat Statistik (BPS) kemiskinan di provinsi lampung pada tahun 2013 sebesar 1.144.760 (jiwa), pada tahun 2014 menurun menjadi sebesar 1.143.930 (jiwa), lalu meningkat pada tahun 2015 menjadi 1.163.500 (jiwa). Namun kenyataannya kenaikan PDRB, berfluktuatif angka pengangguran, dan meningkatnya upah minimum tidak mengurangi angka kemiskinan justru angka kemiskinan meningkat setiap tahunnya.

## 2. Secara Subjektif

- a) Karena data dan referensi terkait dengan judul penelitian telah tersedia di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- b) Kajian dalam judul penelitian ini sesuai dengan dengan kajian keilmuan penulis, yaitu Ekonomi Syari'ah konsentrasi Ekonomi Pembangunan.

## C. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Untuk negara Indonesia salah satu sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Agussalim, Siti Walida Mustamin, Sri Undai Nurbayani, "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan", (Jurnal Analisis, Vol. 4 No. 2, Desember, 2015), H.166.

Kemiskinan di Indonesia disebabkan sangat terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki kelompok tersebut dalam mengakses sumber daya pembangunan.<sup>88</sup> Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.<sup>89</sup> Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Secara umum, orang-orang miskin itu biasanya lebih rentan terhadap penyakit sosial, mulai dari gaya hidup yang menggelandang kurang manusiawi, ketergantungan obat bius, kekerasan rumah tangga, masalah-masalah kesehatan, kehamilan remaja diluar nikah, buta huruf, pengangguran, dan prestasi pendidikan yang rendah.<sup>90</sup>

Kemiskinan dapat diuraikan dari penyebabnya, terdiri dari dua macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu unsur dari budaya yang terdapat disuatu daerah tertentu berdasarkan faktor adat yang dimiliki di daerah tersebut, sehingga sedikitnya bisa dikurangi dengan menghindari faktor adat yang mempengaruhinya untuk bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu keadaan masyarakat yang tidak layak terhadap sistem atau tatanan

---

<sup>88</sup>Faisal H. Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta:Erlangga, 2002) hlm. 98-99.

<sup>89</sup>Fridayana Yudiaatmaja, I Made Parwata, I Wayan Swendra, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat kemiskinan, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Vol 4 Tahun 2016).

<sup>90</sup>N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi*, Jilid 2, (Jakarta:Erlangga, 2000), hlm. 68.

sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada keadaan yang lemah untuk mengakses dan mengembangkan diri mereka sendiri dari cengkaman kemiskinan.

Di samping itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor dan lintas pelaku secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi.<sup>91</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara di belahan dunia yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Sebagai negara berkembang tentu bukan hal yang aneh jika di negara tersebut masih memiliki warga masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan atau dibawah garis kemiskinan. Karena pada kenyataannya negara yang dianggap maju sekalipun memiliki penduduk miskin di wilayahnya.<sup>92</sup>

Sejalan dengan itu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak memecahkan masalah kependudukan, seperti besarnya

---

<sup>91</sup>Fridayana Yudiaatmaja, I Made Parwata, I Wayan Swendra, *Op. Cit*,

<sup>92</sup>Tannia Octasari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2009-2013", *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Vol 5, No 6, Tahun 2016, h. 495.

jumlah penduduk Indonesia dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia.<sup>93</sup>

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai dari besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai dari seluruh produksi nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, dalam kurun waktu tertentu, biasanya tiap tahun. PDRB merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunannya di masa yang akan datang. PDRB juga secara tidak langsung merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

PDRB pada hakekatnya menggambarkan tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah, baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dalam suatu periode tertentu, meliputi seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan oleh suatu daerah. Sehingga PDRB secara tidak langsung dapat digunakan sebagai

---

<sup>93</sup>Candra Mustika, "Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008" Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.1, No.4 Oktober 2011, h. 13.

indikator dalam menilai hasil kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.<sup>94</sup>

Pengangguran yang merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan.<sup>95</sup> Pada saat ini lahan pekerjaan manusia sudah banyak tergantikan oleh mesin. Pertambahan lowongan kerja yang lebih rendah dari pada pertambahan tenaga kerja akan mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan.<sup>96</sup>

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.<sup>97</sup>

Dalam rangka meningkatkan penghasilan pekerja menuju penghasilan yang layak, maka sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003, perlu ditetapkan upah minimum dengan tetap mempertimbangkan produktivitas, kemajuan perusahaan, dan perekonomian pada umumnya. Cara pandang terhadap

---

<sup>94</sup>Daryono Soebagiyo, "Kausalitas Granger PDRB Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Dati I Jawa Tengah", Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No. 2, Desember 2007, h. 179.

<sup>95</sup>A.A.N.B. Dwirandra, Ni Luh Nana Putri Ani, "Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3 (2014), h. 482.

<sup>96</sup>Durrotul Mahsunah, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur", h. 3.

<sup>97</sup>Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*, Vol 8, No 3, Oktober 2012, h. 197.

upah minimum masih menjadi perdebatan antara pengusaha, pekerja, pemerintah, bahkan ekonom dan akademisi. Dari sisi pekerja, upah merupakan hak yang harus mereka terima dan upah mestinya mampu memenuhi kebutuhan hidup layak (UU No. 13 tahun 2003).<sup>98</sup>

Upah minimum ini merupakan salah satu pertimbangan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya.<sup>99</sup>

Pertanyaan yang selalu muncul dalam setiap diskusi mengenai ekonomi islam adalah: apakah ekonomi islam berbicara pada dataran positif, normatif atau keduanya? Ekonomi positif membahas mengenai realitas hubungan ekonomi sementara itu, ekonomi normatif membicarakan mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit atau dengan kata lain, disebut "*what ought to be*".

Alquran dan sunnah memang tidak saja berbicara pada dataran normatif, namun juga menyajikan informasi positif. Misalnya lihat kutipan dua surat dalam alquran Q.S Ash-shura : 27 dan QS Al-‘Alaq : 6-7, sebagai berikut:

---

<sup>98</sup>Indra Maipita, "*Simulasi Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan*", *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*–Vol 17, No 3, September 2013, h. 391.

<sup>99</sup>Nursiah Chalid, Yusbar Yusuf, "*Pengaruh Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau*", *Jurnal Ekonomi* Vol 22, No 2, Juni 2014, h. 3.

❖ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ

بِعِبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.” (Q.S Ash Shura:27)

Tafsir ayat diatas adalah, Selain itu, kemurahan Allah adalah di bentangkannya rezeki bagi hamba-hamba-Nya. Allah menyatakan bahwa sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya dengan berbagai kenikmatan dan anugerah, baik yang bersifat materi maupun non-materi niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di muka bumi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Allah dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Ini sudah menjadi tabiat manusia pada umumnya. Dan tetapi dia menurunkan rezeki-rezeki-Nya dengan ukuran tertentu yang dia kehendaki. Sungguh, dia mahateliti tentang hal-hal yang mendetail terhadap semua keadaan hamba-hamba-Nya, maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan dan terima. Hal lain yang menunjukkan kemurahan Allah adalah dialah yang menurunkan hujan dari langit setelah mereka berputus asa untuk mendapatkan air bagi kebutuhan mereka dan untuk

menghadapi ke keringan yang berkepanjangan, dan dia juga menyebarkan rahmat-Nya itu kepada semua makhluk-Nya sehingga semuanya dapat menikmati dan memperoleh manfaatnya. Dan dialah maha pelindung bagi semua makhluk-Nya dari segala yang membahayakan mereka, maha terpuji atas segala rahmat, tindakan, dan kebijaksanaan-Nya.<sup>100</sup>

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْتَفَى ﴿٧﴾

Artinya: “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena Dia melihat dirinya serba cukup.” (Q.S Al-‘Alaq : 6-7)

Tafsir ayat diatas adalah, Manusia sangat bangga dengan materi sehingga tidak segan berbuat zalim. Sekali kali tidak boleh demikian! sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup dengan harta, jabatan, pengikut, dan semisalnya. Apa yang dimiliki membuatnya mudah mengingkari nikmat Allah dan lupa bahwa semua adalah anugerah-Nya.<sup>101</sup>

Ayat-ayat ini menunjukkan bagaimana dampak kekayaan/penghasilan yang substansial terhadap perilaku manusia. Bukti-bukti memang menunjukkan bahwa manusia biasanya cenderung melampaui batas bila merasa lebih kaya dan serba cukup. Nabi Muhammad SAW memperingati kecenderungan serakahnya manusia, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim berikut:<sup>102</sup>

لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًّا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابَ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

<sup>100</sup><https://tafsirweb.com/9117-surat-asy-syura-ayat-27>, 8 Januari 2019, diunduh pukul 15.10.

<sup>101</sup><https://tafsirweb.com/12872-surat-al-alaq-ayat-6>, 8 Januari 2019, diunduh pukul 15.16.

<sup>102</sup>Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga, 2010) Hlm. 20-21.

artinya: “Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya (merasa puas) selain tanah (yaitu setelah mati) dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat.” (HR Bukhari & muslim)

Mungkin pernah terlintas di benak umat Islam bahwa kemiskinan yang dialami seseorang yang disebabkan karena keturunan dan tidak mungkin bisa berubah. Pikiran tersebut adalah pikiran yang salah. Manusia bisa saja merubah nasibnya kalau dia mempunyai keinginan untuk merubah. Pada dasarnya Allah akan memberi rezeki pada setiap orang yang berusaha untuk mendapatkan rezeki-Nya. Allah akan memberi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya, mereka tidak boleh berputus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ  
وَنَشِيرُ الْصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”(Q.S Al Baqarah:155)

Tafsir ayat diatas adalah, Kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buahbuahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apa pun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, inna' lilla'hi wa inna' ilaihi ra'ji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali).

Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah: pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari tuhanNya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran.<sup>103</sup>

Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagaimana seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang kaya diperintahkan untuk menyantuni mereka yang hidupnya serba kekurangan (miskin). Dengan tegas, Allah swt dalam firman-Nya menganpologikan bahwa orang yang membiarkan sesamanya kelaparan sama saja dengan mendustakan agama yang agung. Al-Quran mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.<sup>104</sup>

Dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung, yang dijadikan sebagai objek penelitian berjumlah 14 Kabupaten/Kota, dikarenakan ketersediaan data di Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Kabupaten yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini adalah Pesisir Barat. Pesisir Barat merupakan kabupaten yang terbentuk pada tahun 2013, karena Pesisir Barat merupakan kabupaten baru, data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung belum tersedia secara

---

<sup>103</sup><https://tafsirweb.com/624-surat-al-baqarah-ayat-155>, 8 Januari 2019, diunduh pukul 15.19.

<sup>104</sup>Bayu Tri Cahya, *Kemiskinan Ditinjau Dari Perpektif Al-Quran dan Hadis*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, h.53-54.

lengkap. Data diambil tahun 2013-2015 dikarenakan ditahun sebelumnya Provinsi Lampung selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya, ditahun tersebut Provinsi Lampung justru mengalami kenaikan penduduk miskin.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung**  
**Tahun 2013-2015**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)</b>
1	2013	7.932.132	1.144.760
2	2014	8.026.191	1.143.930
3	2015	8.109.601	1.163.500

*Sumber: BPS Provinsi Lampung 2018*

Angka Kemiskinan Provinsi Lampung kembali mengalami kenaikan pada 2015 ini. Berdasarkan hasil survei terbaru diketahui Angka Kemiskinan Provinsi Lampung 2015 sebesar 1.163.490 (jiwa). Data 2014 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung masih 1.143.930 (jiwa), sedangkan pada tahun 2013 Angka Kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 1.144.760 (jiwa). Dengan kata lain dari tahun 2013-2015, Provinsi Lampung sempat mengurangi sedikit jumlah penduduk miskinnya pada tahun 2013 ke 2014. Namun, kembali meningkat cukup besar pada tahun 2015. Jika dipersentasikan Angka Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2015 sebesar 14,35%, ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Nasional yang sebesar 11,22%.

**Tabel 1.2**  
**Data Persentase PDRB, Pengangguran, Upah Minimum, dan Kemiskinan**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2014 (Persen)**

No	Data Prsentase 2013-2014 (Persen)				
	Wilayah	PDRB	Pengangguran	Upah Minimum	Kemiskinan
1	Lampung Barat	5	(16)	22	(1)
2	Tanggamus	5	3	22	(1)
3	Lampung Selatan	5	1	22	(1)
4	Lampung Timur	2	(6)	22	(1)
5	Lampung Tengah	5	(22)	21	(1)
6	Lampung Utara	5	(14)	22	(1)
7	Way Kanan	4	(17)	21	(1)
8	Tulang Bawang	4	4	21	9
9	Pesawaran	4	(6)	22	(1)
10	Pringsewu	5	1	22	1
11	Mesuji	5	(90)	22	14
12	Tulang Bawang Barat	4	41	22	14
13	Bandar Lampung	5	(19)	22	(0,47)
14	Metro	4	(3)	22	(1)

**Tabel 1.3**  
**Data Persentase PDRB, Pengangguran, Upah Minimum, dan Kemiskinan**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2014-2015 (Persen)**

No	Perbandingan Tahun 2014-2015 (Persen)				
	Wilayah	PDRB	Pengangguran	Upah Minimum	Kemiskinan
1	Lampung Barat	4	9	14	(30)
2	Tanggamus	4	21	13	(4)
3	Lampung Selatan	4	(16)	14	(3)
4	Lampung Timur	4	(6)	13	(0,37)
5	Lampung Tengah	4	18	13	2
6	Lampung Utara	5	28	13	(0,23)
7	Way Kanan	4	3	13	(2)
8	Tulang Bawang	4	21	13	20
9	Pesawaran	4	(19)	13	2
10	Pringsewu	4	7	13	21
11	Mesuji	4	503	13	25
12	Tulang Bawang Barat	4	(47)	12	16
13	Bandar Lampung	4	9	16	(1)
14	Metro	4	24	13	(4)

dari data diatas dapat dilihat terjadi kesenjangan antara teori dan praktek, dalam teori kenaikan PDRB, menurunnya angka Pengangguran, dan naiknya Upah Minimum seharusnya dapat menurunkan angka Kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

Namun disini kita dapat melihat angka di tabel kenaikan PDRB, menurunnya angka Pengangguran dan naiknya Upah Minimum belum bisa mengurangi angka Kemiskinan. Justru mengalami hal yang sebaliknya yakni kabupaten/kota mengalami peningkatan penduduk miskin.

Dari tabel diatas dapat dilihat bagaimana Kabupaten Mesuji Tahun 2013-2014 naiknya PDRB sebesar 5%, menurunnya Pengangguran sebesar 90%, dan naiknya Upah Minimum sebesar 22%, tidak diikuti dengan menurunnya angka Kemiskinan, justru meningkat Kemiskinan sebesar 14%. Masalah yang sama jugadialami Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014-2015, naiknya PDRB sebesar 4%, menurunnya Pengangguran sebesar 47%, naiknya Upah Minimum sebesar 12%, justru diikuti pula dengan kenaikan angka Kemiskinan sebesar 16%.

Data diatas merupakan angka persentase pergeseran dari tahun-ketahun dari PDRB, Pengangguran, Upah Minimum, dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015. Dari beberapa masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 Perspektif Ekonomi Islam”.

#### **D. BATASAN MASALAH**

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini. Fokus masalah dalam penelitian ini ialah Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015. Adapun variabel bebas yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah PDRB, Pengangguran, Upah Minimum.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum secara parsial dan simultan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 ?
2. Bagaimana Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

#### **F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian sebagai berikut:

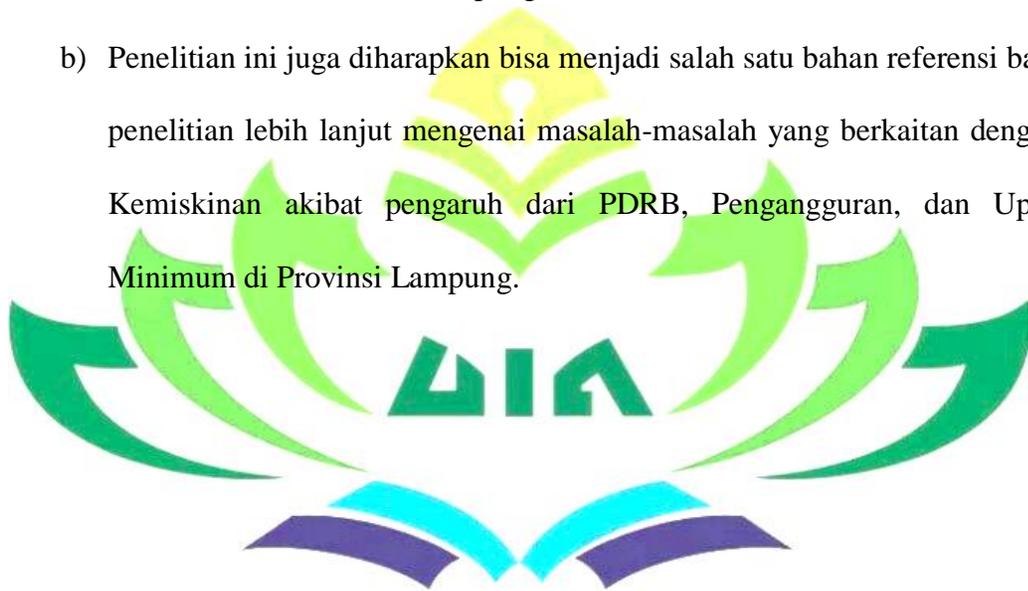
- a) Untuk menganalisa apakah terdapat pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum secara parsial dan simultan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

- b) Untuk menganalisa bagaimana Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam.

## 2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan tolak ukur bagi pemerintah maupun swasta untuk lebih memperhatikan tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung.
- b) Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Kemiskinan akibat pengaruh dari PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum di Provinsi Lampung.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai dari besarnya tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai dari seluruh produksi nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, dalam kurun waktu tertentu, biasanya tiap tahun.<sup>105</sup>

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku atau atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai harga dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun

---

<sup>105</sup>Daryono Soebagiyo, *Op. Cit.* h. 179.

atau triwulan ke triwulan). Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:<sup>106</sup>

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut Ischak P. Lumbantobing, Dengan cara ini pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa yang diwujudkan oleh berbagai sektor lapangan usaha pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).<sup>107</sup>

b. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan – kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Pada sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan tidak diperhitungkan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran digunakan untuk menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah tangga, pemerintah dan yayasan sosial, pembentukan modal dan ekspor, nilai barang dan jasa hanya berasal dari produksi domestik, total

---

<sup>106</sup>Katalog BPS, *Produk Domestik Bruto Kota Bandar Lampung Menurut Pengeluaran*, BPS, Kota Bandar Lampung 2012-2016, hlm. 3-4.

<sup>107</sup>Ischak P. Lumbantobing, “Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto Di Dki Jakarta”, *Journal Of Research In Economics And Management (Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen)*, Volume 17, No. 1, Januari – Juni, h. 3.

pengeluaran dari komponen-komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga nilai ekspor yang dimaksud adalah ekspor neto, penjumlahan seluruh komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga pasar.<sup>108</sup>

## 1. Pengertian PDRB

Menurut daryono, PDRB pada hakekatnya menggambarkan tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah, baik yang dilakukan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dalam suatu periode tertentu, meliputi seluruh hasil produksi atau output yang diciptakan oleh suatu daerah. Sehingga PDRB secara tidak langsung dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai hasil kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.<sup>109</sup>

Menurut Sukirno, PDRB memiliki perbedaan atas dasar yaitu: (1) PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan totalitas dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar). Dengan menggunakan harga konstan maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi atau deflasi), (2) PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan total dari nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Struktur PDRB suatu wilayah biasanya disajikan atas dasar harga berlaku.

---

<sup>108</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm. 60.

<sup>109</sup>Daryono Soebagiyo, *Op. Cit*, h. 179

Menurut Thamrin Pertumbuhan ekonomi atau peningkatan PDRB merupakan salah satu ukuran dan indikasi penting untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya. Membaiknya indikator pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masalah kemiskinan yang menjadi isu penting. PDRB sering digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut.<sup>110</sup>

## 2. Metode Perhitungan PDRB

Metode yang dapat digunakan untuk mencari sektor unggulan dengan menggunakan data PDRB adalah metode *Overlay* dan *Shift Share*. Dimana data PDRB yang digunakan dalam bentuk laju pertumbuhan dan kontribusi dari tiap sektor.

### a. Metode Overlay

Berdasarkan Basuki dan Gayatri, analisis ini dimaksudkan untuk menentukan sektor potensial berdasarkan penggabungan Metode MRP dan metode LQ. Metode ini mempunyai empat penilaian atau kemungkinan, yaitu:

1. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (+), meunjukkan suatu kegiatan yang sangat dominan baik dari pertumbuhan maupun dari kontribusi.

---

<sup>110</sup> M. Alhudori, Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi, *Jurnal Of Economics And Business*, Vol 1, No 1 September 2017, h. 115.

2. Pertumbuhan (+) dan kontribusi (-) menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan kontribusinya untuk menjadi kegiatan yang dominan.
3. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (+) menunjukkan suatu kegiatan yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Kegiatan ini sangat memungkinkan bahwa kegiatan sedang mengalami penurunan.
4. Pertumbuhan (-) dan kontribusi (-) menunjukkan suatu kegiatan yang tidak potensial baik dari kriteria pertumbuhan maupun dari kontribusi.

b. *Metode Shift Share*

Menurut Basuki dan Gayatri, analisis *Shift-Share* adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi sebagai pembanding.

1. Dampak nyata pertumbuhan ekonomi wilayah studi:

$$D_{i1} = N_{i1} + M_{i1} + C_{i1}$$

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi referensi, dapat menggunakan

$$\text{rumus: } N_{i1} = E_{ij} r_2$$

3. *Proportional shift* dapat diperoleh dari rumus:

$$M_{i1} = E_{i1} (r_{i2} - r_2)$$

4. Pengaruh keunggulan kompetitif adalah:

$$C_{i1} = E_{i1} (r_{i1} - r_2)$$

Dimana:

$$r_2 = (E_{2,t} - E_{2,t-1}) / E_{2,t-1}$$

$$r_{i2} = (E_{i,2,t} - E_{i,2,t-1}) / E_{i,2,t-1}$$

$$r_{i1} = (E_{i,1,t} - E_{i,1,t-1}) / E_{i,1,t-1}$$

Di1: Perubahan nyata Pertumbuhan ekonomi sektor i di wilayah studi

Ni1: Komponen pengaruh pertumbuhan wilayah referensi untuk sektor i di wilayah studi

Mi1: Komponen pergeseran proporsional (*proposional shift*) atau bauran industri (*industry mix*) untuk sektor i di wilayah studi

Ci1: Komponen pengaruh keunggulan kompetitif (*differential shift*) untuk sektor i wilayah studi.<sup>111</sup>

### 3. Hubungan PDRB Dengan Kemiskinan

Menurut Kuznet, pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.<sup>112</sup>

Menurut tambunan, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi

---

<sup>111</sup>Rosita Wahyuningtyas, Agus Rusgiyono, Yuciana Wilandari, *Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)*, Jurnal Gaussian, Vol 2, No 3, Tahun 2013, h. 223.

<sup>112</sup>Endah Ernany Triariyani, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Berau*, Jurnal Ekonomi, h. 7.

tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan, yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Menurut Kuncoro pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdasarkan pada kualitas dan pada konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.<sup>113</sup>

Todaro dan Stephen C. Smith, juga mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan

---

<sup>113</sup>Himawan Yudistira Dama, Agnes L Ch Lopian, Jacline I. Sumual, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014)*, Vol 16 No. 03 Tahun 2016, h. 556.

ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil.<sup>114</sup>

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan produk domestik regional bruto (PDRB) banyak ahli yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa maksud pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Perspektif islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh

---

<sup>114</sup>Meilen Gleri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran, *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004- 2012*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 14, no. 3, Oktober 2014, h. 33.

allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.

Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi telah digambarkan dalam Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12 sebagai berikut:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِتْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

Artinya: "maka aku katakan kepada mereka: memohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebon dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai-sungai".(Q.S Nuh : 10-12).<sup>115</sup>

Tafsir ayat diatas adalah, Itu semua telah kulakukan maka aku pun berkata kepada mereka, 'mohonlah ampunan kepada tuhanmu atas segala dosa terutama dosa syirik. Sungguh, dia maha pengampun bagi siapa saja yang tulus memohon ampunan-Nya. "kalau kamu benar-benar memohon ampunan-Nya niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan pula kebun-kebon untukmu yang dapat kamu nikmati keindahan dan buahnya dan mengadakan sungai-sungai untukmu guna mengairi kebun dan memberi minum ternakmu."<sup>116</sup>

pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi secara benar yang

---

<sup>115</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet. Ke-10*, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.

<sup>116</sup><https://tafsirweb.com/11394-surat-nuh-ayat-10-12>, 8 Januari 2019, diunduh pukul 15.28.

mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam islam, kesejahteraan tersebut dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan begitu mampu memperbaiki keadaan seseorang yang buruk menjadi lebih baik.

## **B. Pengangguran**

Salah satu aspek dalam kinerja ekonomi adalah sejauh mana suatu perekonomian menggunakan sumber daya dengan baik. Karena para pekerja suatu perekonomian adalah sumber daya utamanya, menjaga para pekerja tetap bekerja menjadi puncak perhatian para pembuat kebijakan ekonomi. Tingkat pengangguran adalah statistik yang mengukur persentasi orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan.<sup>117</sup>

Masalah pengangguran jika dikaji dari sudut persediaan tenaga kerja adalah menguntungkan, karena akan dapat membuka beraneka macam proyek. Dengan berlimpah-limpahnya tenaga kerja ini maka upah akan relatif rendah dan ini sangat menguntungkan untuk membuka proyek-proyek. Tegasnya jika tenaga kerja penganggur ini dapat diarahkan secara baik oleh pemerintah dalam mengerjakan beraneka macam proyek sangat menguntungkan sebab biaya itu akan kecil. Tetapi tenaga kerja penganggur jika dikaji dari sudut penyediaan lapangan kerja, penyediaan dana-dana sosial, keamanan, politis mereka ini sangat merugikan dan sangat menggelisahkan pemerintah bahkan menjadi suatu problem yang harus diatasi.

---

<sup>117</sup>N. Gregory Mankiw, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi 4, (Jakarta:Erlangga, 2000), Hlm. 32.

Karena jika penganggur banyak ini akan mengakibatkan tingkat pendapatan per kapita menjadi kecil, karena mereka ini akan hidup parasit pada tenaga kerja yang produktif. Jadi bagaimanapun juga secara makro penganggur ini sangat menggelisahkan dan sangat merugikan dan bahkan merupakan salah satu tolak ukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam pembangunan ekonominya. Jika tingkat penganggur cukup tinggi dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah tidak berhasil dalam pembangunan ekonominya, sebaliknya jika tingkat penganggur kecil maka pemerintah berhasil dalam pembangunan ekonominya.<sup>118</sup>

### **1. Pengertian Pengangguran**

Menurut Tambunan, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan kita. Bahkan, masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah-masalah baru di bidang ekonomi

---

<sup>118</sup>*Ibid*, h.97.

maupun nonekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan.<sup>119</sup>

Menurut Soekirno pengangguran adalah “seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan”. Irawan dan Suparmoko mendefinisikan pengangguran adalah “mereka yang berada dalam umur angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku”. Sedangkan menurut Suparmoko pengangguran adalah “ketidak mampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah angkatan kerja yang secara aktif mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki, namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan mereka belum mendapat pekerjaan sesuai dengan yang mereka inginkan.<sup>120</sup>

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan masalah ekonomi dan sosial kepada siapa yang mengalaminya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran

---

<sup>119</sup>Yarlina Yacoub, *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*, Vol 8, No 3, Oktober 2012, Jurnal EKSOS, h. 177.

<sup>120</sup>Durrotul Mahsunah, *Op. Cit.* h. 6.

konsumsinya. Selain itu pengangguran juga dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga.

a. Teori Lewis

Lewis menyatakan tujuan dari teori mengenai proses pembangunan yang khusus di peruntukan bagi Negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di banyak Negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal, dan keluasan tanah yang belum digunakan sangat terbatas.

b. Teori Ranis dan Fei

Teori ini dikembangkan oleh dua ahli ekonomi, yaitu Gustav Ranis dan John Fei. Analisis teori Ranis dan Fei dimaksudkan sebagai teori pembangunan untuk Negara yang menghadapi masalah kelebihan jumlah penduduk sehingga menghadapi masalah pengangguran yang serius, dan kekayaan alam yang tersedia dan dapat dikembangkan sangat terbatas.<sup>121</sup>

## 2. Jenis dan Bentuk Pengangguran

Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan penambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau

---

<sup>121</sup>Firi Amalia, "Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Dikawasan Timur Indonesia (Kti) Perionde 2000-2010", *Econosains* Vol 10, No 2, Agustus 2012, h.161.

tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain juga, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja.

Menurut Sukirno macam-macam pengangguran berdasarkan jam kerja dapat digolongkan menjadi empat, yaitu pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, setengah pengangguran dan pengangguran terbuka.

- a. Pengangguran tersembunyi adalah, pengangguran yang terjadi karena adanya keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. Contohnya, dalam kegiatan produksi yang dapat berjalan efektif dan efisien dengan 6 pekerja saja, namun dalam kenyataannya dikerjakan oleh 8 orang pekerja. Dari penjelasan ini terlihat bahwa ada kelebihan pekerja sebanyak 2 orang. Kelebihan inilah yang disebut pengangguran tersembunyi.
- b. Pengangguran musiman adalah, keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam suatu tahunan. Contohnya adalah masa menunggu petani dalam musim panen, pada saat ini petani yang tidak memiliki pekerjaan sampingan akan menjadi pengangguran.
- c. Setengah menganggur (*under unemployment*) adalah, keadaan dimana pengangguran dimana seorang pekerja melakukan kerja jauh lebih rendah dari jam kerja yang normal. Seorang dapat digolongkan setengah

menganggur jika dalam bekerja tidak lebih dari 20 jam dalam seminggu atau 3 hari dalam seminggu.

- d. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah, tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terbuka termasuk pengangguran yang sangat banyak karena memang belum mendapatkan pekerjaan meskipun sudah berusaha untuk mencapai pekerjaan.<sup>122</sup>

### 3. Hubungan Pengangguran Dengan Kemiskinan

Menurut Sukirno bahwa salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat terwujud, sehingga apabila tidak bekerja atau menganggur maka akan mengurangi pendapatan dan hal ini akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai sehingga dapat menimbulkan buruknya kesejahteraan masyarakat.<sup>123</sup>

Ada hubungan yang sangat erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian mereka yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (*part time*) selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintahan dan

---

<sup>122</sup>Rovia Nugrahani Pramesthi, *Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek*, h. 5.

<sup>123</sup>Endah Ernany Triariani, *Op. Cit*, h. 7.

swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.<sup>124</sup>

Menurut Amalia, pengangguran merupakan keadaan yang keberadaannya tidak terelakan, baik itu negara berkembang maupun di negara maju sekalipun. Pengangguran memiliki keterbatasan memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan karena pengangguran sangat berpengaruh pada terjadinya masalah kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, dan kemiskinan.<sup>125</sup>

Menurut Sadono Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.<sup>126</sup>

#### **4. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Definisi pengangguran sebagaimana yang ada dalam ekonomi konvensional yang membatasi penganggur hanya pada pencari kerja yang tidak mendapatkan

---

<sup>124</sup>Ibid, h. 8.

<sup>125</sup>Anak Agung Istri Diah Paramita, Ida Bagus Putu Purbadharmaja, *Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali*, E-Jurnal Ep Unud, 4 [10], h. 1201.

<sup>126</sup>Dicky Wahyudi, Tri Wahyu Rejekingsih, *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*, Diponegoro Journal Of Economics Vol 2, No 1, Tahun 2013, h. 3.

pekerjaan, adalah definisi yang sangat sempit bila dilihat dari kaca mata Islam. Karena Islam memandang istilah kerja sangat umum, yakni menyangkut segala aktifitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah yang dimaksudkan untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara Syar'i.<sup>127</sup>

Allah sangat mencintai orang yang bekerja untuk memenuhi biaya hidup dan kehidupannya, terlebih lagi untuk bekal beribadah kepada-Nya. Sebaliknya Allah sangat membenci orang-orang yang senang menganggur, lemah, lunglai dan tidak mau berusaha sehingga menggantungkan hidupnya pada orang lain. Seorang yang bekerja akan ditinggikan Allah derajatnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaaf ayat 19 berikut:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q. S. Al-Ahqaaf:19)

Tafsir ayat diatas adalah, Setelah dijelaskan tentang dua kelompok manusia pada ayat-ayat di atas kini Allah menjelaskan tentang keadilan Allah dalam memberikan balasan kepada mereka, dan setiap orang dari kedua kelompok manusia sebagaimana yang disebutkan itu memperoleh tingkatan yakni peringkat yang berbeda-beda baik di surga maupun di neraka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan peringkat itu disempurnakan agar

---

<sup>127</sup>Ali Murtadho, *Solusi Problem Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 28, No.1, Januari-Juni 2008, H 180-181.

Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan dengan mengurangi ganjaran atau menambah siksaan.<sup>128</sup>

Bekerja bukan sekedar untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup secara material semata, namun bekerja juga dapat mengantarkan seseorang kepada kesuksesan dalam hidup dan kehidupan. Sebaliknya apabila seseorang menganggur akan memejamkan hati, menghayal yang tidak-tidak dan akhirnya bisa menjerumuskan pada perbuatan yang kurang baik.<sup>129</sup>

### C. Upah Minimum

Pemerintah menyebabkan kekakuan upah ketika mempertahankan upah agar tidak mencapai titik keseimbangan. Undang-undang upah minimum menetapkan tingkat upah minimal yang harus dibayar perusahaan kepada para karyawannya. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Standar kerja yang adil 1938 (*fair labor standards act of 1938*), pemerintah federal AS mendorong Upah Minimum yang biasanya berada diantara 30 dan 50 persen dari upah rata-rata dalam manufaktur. Bagi sebagian besar pekerja, upah minimum ini tidak mengikat, karena mereka menikmati upah diatas upah minimum. Bagi sebagian pekerja, terutama yang tidak terdidik dan kurang berpengalaman, upah minimum meningkatkan upah mereka diatas tingkat keseimbangan karena itu, upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang di minta perusahaan.

---

<sup>128</sup><https://tafsirweb.com/9585-surat-al-ahqaf-ayat-19>, 8 Januari 2019, diunduh pukul 16.13.

<sup>129</sup><https://tafsirq.com/hadits> nasai (diunduh tanggal 11 Oktober 18)

Para ekonom percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar pada pengangguran usia muda. Upah keseimbangan para pekerja usia muda cenderung turun karena 2 alasan. Pertama, karena para pekerja usia muda adalah di antara anggota angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang berpengalaman, mereka cenderung memiliki produktivitas marjinal yang rendah. Kedua, para pemuda seringkali mengambil sebagian dari “kompensasi” mereka dalam bentuk *on-the-job* diberikan sebagai pengganti upah. Untuk kedua alasan ini, upah di mana penawaran pekerja usia muda sama dengan permintaannya adalah rendah. Karena itu, upah minimum seringkali mengikat para pemuda ketimbang yang lainnya di dalam angkatan kerja.

Banyak ekonom telah mempelajari dampak upah minimum pada tenaga kerja usia muda. Para peneliti ini membandingkan variasi dalam upah minimum dengan variasi dalam jumlah pemuda yang bekerja. Studi ini menemukan bahwa 10 persen kenaikan dalam upah minimum mengurangi para pekerja usia muda 1 sampai 3 persen.<sup>130</sup>

### **1. Dasar Hukum Upah Minimum**

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 78 Tahun 2015, Upah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

---

<sup>130</sup>N. Gregory Mankiw, *Op. Cit.* h. 130.

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan/jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>131</sup>

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam pasal 41-50 Undang-Undang No.78 Tahun 2015. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1-2 terdiri atas.<sup>132</sup>

- 1) Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai jaringan pengaman.
- 2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas:
  - a. Upah tanpa tunjangan.
  - b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Upah minimum yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar kebutuhan seorang pekerja /buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Komponen dan pelaksanaan tahap pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Pengusaha

---

<sup>131</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, *Tentang Pengupahan*, BAB IV, Pasal 1.

<sup>132</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 78 Tahun 2015, *Tentang Pengupahan*, BAB IV, Pasal 41.

dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41.<sup>133</sup>

Pemerintah menetapkan upah minimum yang diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan jaringan pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah dengan harapan kebutuhan dasar bagi kehidupan pekerja relatif mendekati terjangkau. Namun kenyataannya upah minimum masih jauh dari kebutuhan dasar pekerja sehingga belum berhasil menciptakan hubungan industrial seperti yang diharapkan.

## 2. Pengertian Upah Minimum

Menurut Kusnaini, upah minimum adalah sebuah kontroversi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), Hlm. 109.

<sup>134</sup>Maimun Sholeh, *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah:Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol 4, No 1, April 2007, h. 69.

Menurut Simanjuntak, Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara, yang pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.

### 3. Hubungan Upah Minimum Dengan Kemiskinan

Menurut Oetomo, Salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah upah. Upah merupakan suatu permasalahan yang cukup menarik karena sebagian besar dari pengangguran yang ada lebih memilih bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup (walaupun masih mencari pekerjaan yang lebih baik tingkat upahnya), dari pada dipaksakan bekerja di sektor formal dengan upah yang minim. Jadi bukan berarti lapangan pekerjaan tidak tersedia, tetapi informasi dari lapangan pekerjaan tersebut yang minim sehingga sulit untuk mencari pekerjaan dengan upah yang sesuai walaupun sebenarnya pemahaman tentang upah yang sesuai adalah relatif dengan kebutuhan yang ada.<sup>135</sup>

Menurut Kaufman, Upah minimum merupakan usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup

---

<sup>135</sup>Tety Marini, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Berau*, Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Vol 12, No 1, 2016, h. 111-112.

minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.<sup>136</sup> Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.<sup>137</sup>

Menurut Sumarsono, pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu:

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang.
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja.

Menyatakan beberapa ekonom melihat bahwa penetapan upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja. Kelompok ekonom lainnya dengan bukti empirik menunjukkan bahwa penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.<sup>138</sup>

Dilain pihak, beberapa ekonom dan pembuat kebijakan berusaha untuk mengurangi (dan bahkan menghapus) peraturan upah minimum agar pasar tenaga kerja lebih fleksibel dan meningkatkan daya saing. Menurut Gindling

---

<sup>136</sup>Ibid, h.116.

<sup>137</sup>Sudirman, Lili Andriani, *Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi*, Jurnal Of Economics And Business Vol.1 No.1 September 2017, h. 149.

<sup>138</sup> Rini Sulistiawati, *Op. Cit*, h. 201.

dan Terrell, para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa kekakuan di pasar tenaga kerja, seperti kekakuan upah yang disebabkan oleh upah minimum, dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja dan pada gilirannya memberikan kontribusi pada pengangguran dan kemiskinan. Menurut Burkhauser et.al, Penentang peraturan upah minimum juga berpendapat bahwa kebijakan upah minimum hanya memiliki dampak terbatas pada kemiskinan, terutama karena sebagian besar keluarga miskin tidak memiliki upah minimum.<sup>139</sup>

#### 4. Upah Minimum Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*.

Kerjasamanya disebut *al ijārah*. *Al ijārah* berasal dari kata “*al ujah*” atau “*al ajru*” yang menurut bahasa berarti *al ‘iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut Helmi karim, istilah *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian atau pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.

Menurut Sudarsono, Pada garis besarnya *ijārah* terdiri atas dua pengertian, yaitu:

---

<sup>139</sup> Ardhan Kurniawati, Beni Teguh Gunawan, Disty Putri Ratna Indrasari, *Dampak Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014*, *Journal Of Research In Economics and Management*, Volume 17, No. 2, Juli – Desember, h. 2.

1. pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu 'ain, seperti: rumah dan pemakaian.
2. pemberian akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan.

Pengertian pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan pengertian yang kedua lebih tertuju kepada upah mengupah.

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Hal ini sesuai dengan hadist: ٥

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ  
Artinya: dari Abdullah Ibn Umaar berkata: Rosul SAW bersabda: "berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya" (H.R. Ibnu Majah).

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al ujah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (*al ujah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban

masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut.<sup>140</sup>

Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surat Al-Taubah ayat 105:



وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan katakanlah: bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS Al-Taubah : 105)

Tafsir ayat diatas adalah, Dan katakanlah, kepada mereka yang bertobat, bekerjalah kamu, de-ngan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu, begitu juga rasul-Nya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan, yakni

---

<sup>140</sup>Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015, h. 159-161.

meninggal dunia dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampilkan atau yang kamu sembunyikan. Selain terdapat kelompok yang mengakui dosa-dosa mereka lalu dianjurkan untuk bertobat dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; mungkin Allah akan mengazab mereka, karena mereka tetap dalam kedurhakaan, dan mungkin Allah akan menerima tobat mereka, jika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah maha mengetahui orang yang bertobat secara tulus, mahabijaksana dalam menetapkan keputusannya.<sup>141</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa menurut konsep Islam, upah terdiri dari dua bentuk, yaitu upah dunia dan upah akhirat. Dengan kata lain, ayat tersebut di atas mendefinisikan upah dengan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan yang berupa pahala di akhirat. Imbalan materi yang diterima seorang pekerja di dunia haruslah adil dan layak, sedangkan imbalan pahala akhirat merupakan imbalan yang lebih baik yang diterima oleh seorang muslim dari Tuhan-Nya.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup><https://tafsirweb.com/3121-surat-at-taubah-ayat-105>, 8 Januari 2019, diunduh pukul 16.15.

<sup>142</sup>Murtadho, *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Jurnal Equilibrium, Vol 1, No.2, Desember 2013, h. 251-256.

#### D. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu masalah krusial yang hampir dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Secara umum definisi kemiskinan dapat diartikan, sebagai ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan.<sup>143</sup> Kemiskinan adalah suatu penyakit ekonomi yang mempengaruhi semua kelompok populasi, meskipun besar-kecilnya pengaruh tersebut tidak sama bagi masing-masing kelompok.<sup>144</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata

---

<sup>143</sup>Candra Mustika, *Op. Cit*, h. 14

<sup>144</sup>N. Gregory Mankiw, *Op. Cit*, h. 57

masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.<sup>145</sup>

### 1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Ravallion kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat.<sup>146</sup> Orang umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.

Menurut sen, kemiskinan lebih terkait pada ketidak mampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak. Sedangkan terminologi lainnya tentang kemiskinan

menurut suryanto, kemiskinan struktural adalah: kemiskinan yang ditenggarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Lebih lanjut Kemiskinan Kultural : Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah

---

<sup>145</sup>Prof. Dr. Sam F. Poli, M.A, *Memberdayakan Kaum Miskin* (Yogyakarta: 2005), hlm. 75.

<sup>146</sup>Durrotul Mahsunah, *Op. Cit*, h. 3

tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan.

Menurut Todaro Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dimana mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah “garis kemiskinan internasional”.<sup>147</sup>

## 2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.<sup>148</sup>

### a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan yang diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan minimum. Dan seseorang atau keluarga itu dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari atau tidak mencapai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang atau keluarga hidup secara layak.

---

<sup>147</sup>Candra Mustika, *Op. Cit*, h. 15.

<sup>148</sup>Lincoln Arsyad, *Op.Cit*, h. 301.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dimana seseorang atau keluarga itu tinggal. Sehingga walaupun seseorang atau keluarga itu pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, tetapi tergolong orang-orang yang berpendapatan lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di lingkungannya dan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di luar lingkungannya, maka seseorang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin.<sup>149</sup>

c) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu kepada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Faktor budaya tersebut misalnya tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

d) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh

---

<sup>149</sup>Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*, Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 – 11, h. 4.

masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pencapaian pendapatan.<sup>150</sup>

### 3. Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut *World Bank* menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.<sup>151</sup>

### 4. Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ibn Qayyim berpendapat yaitu “daripada kalangan orang kaya dan orang miskin, yang paling disukai adalah makhluk yang bertaqwa pada Allah dan dia

---

<sup>150</sup>Keppi Sukesi, *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*, Cet 1, (Malang:Universitas Brawijaya Press, 2015), hlm. 31.

<sup>151</sup>Endah Ernany Triariani, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Berau*, Jurnal Ekonomi, h. 6.

melebihkan amanah-amanah baik. Oleh itu, orang kaya dan orang miskin adalah sama dalam asas ukuran ini.” Dia juga berpendapat bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ciptaan Allah SWT untuk menguji hamba-hambanya siapa yang lebih baik dalam amalan-amalannya. Kadang-kala Allah menguji seseorang dengan memberikan kepadanya kekayaan yang melimpah ruah. Pada masa yang lain seseorang itu diuji dengan kemiskinan.<sup>152</sup> Dalam Al-Quran dalam Surat Al-Fajr ayat 15-18 menjelaskan sebagai berikut:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾  
 وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تَكْرُمُونَ  
 الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿١٨﴾

Artinya: “adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku”. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin”. (QS Al-Fajr : 15-18).

Tafsir ayat diatas adalah, pada ayat ke-15 Ayat ini menjelaskan sifat dasar manusia kafir ketika mendapat kebahagiaan dan kesusahan, yakni bergembira berlebihan saat mendapat kenikmatan dan putus asa ketika tertimpa kesulitan. Maka adapun manusia, apabila tuhan mengujinya lalu dia memuliakannya dan memberinya kesenangan serta kenikmatan, baik lahir maupun batin, maka dia berkata, 'tuhanku telah memuliakanku. ' mereka menilai kenikmatan yang

<sup>152</sup>Prof. Dr. Joni Tamkin Bin Borhan, *Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Jurnal Usuluddin*, Bil 25 (2007), h. 97.

diterimanya adalah berkat kemuliaannya di sisi Allah. Mereka lupa bahwa nikmat itu pada dasarnya salah satu bentuk ujian Allah kepada manusia. Ayat ke-16 Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, 'Tuhanku telah menghinakanku.' Mereka tidak dapat memahami bahwa kefakiran dan kesusahan bukanlah tolak ukur mutlak bagi kehinaan seseorang di mata Allah karena keduanya tidak lain hanyalah cobaan dari Allah. Ayat ke-17. Sekali-kali tidak demikian. Ketahuilah, kemuliaan seseorang tidak diukur dari kekayaannya dan kehinaan tidak dipandang dari kemiskinannya. Kemuliaan diukur dari ketaatan dan kehinaan adalah akibat kemaksiatan seseorang kepada Allah. Bahkan kamu tidak memuliakan, menyantuni, mengasihi, dan menolong anak yatim. Kamu biarkan mereka susah, padahal menyantuni mereka adalah amal saleh yang menjanjikan derajat tinggi di sisi Allah. Ayat ke-18 dan kamu tidak saling mengajak satu sama lain untuk memberi makan orang miskin. Tidak mengajak orang lain untuk berbuat baik juga merupakan tindakan tidak terpuji. Mengajak orang lain berbuat baik adalah tindakan terpuji, apa lagi jika dibarengi dengan melakukannya. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Memberi makanan fakir miskin, baik muslim atau bukan, adalah suatu bentuk kesalehan sosial yang sangat terpuji.<sup>153</sup>

Mungkin pernah terlintas dibenak umat Islam bahwa kemiskinan yang dialami seseorang yang disebabkan karena keturunan dan tidak mungkin bisa

---

<sup>153</sup><https://tafsirweb.com/12651-surat-al-fajr-ayat-15-18>, 8 Januari 2019, diunduh pukul 16.20.

berubah. Pikiran tersebut adalah pikiran yang salah. Manusia bisa saja berubah nasibnya jika dia mempunyai keinginan untuk merubah. Pada dasarnya Allah akan memberi rezeki pada orang yang berusaha untuk mendapatkan rezeki-Nya. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya, mereka tidak boleh berputus asa dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan adalah seni untk mencapai sesuatu yang ideal. Orang tidak akan merasakan sesuatu keindahan kalau mereka tidak pernah merasakan sesuatu yang buruk. Orang tidak akan merasakan betapa nikmatnya kekayaan memiliki kalau mereka tidak pernah merasakan betapa susahya menjalani kehidupan yang serba kekurangan.

Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagaimana seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang kaya diperintahkan untuk menyantuni mereka yang hidupnya serba kekurangan (miskin). Dengan tegas, Allah SWT dalam firman-Nya menganpologikan bahwa orang yang membiarkan sesamanya kelaparan sama saja dengan mendustakan agama yang agung. Al-Quran mewajibkan kepada setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan material, maka paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.<sup>154</sup>

---

<sup>154</sup>Bayu Tri Cahya, *Op. Cit*, h. 53-54.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. I Made Parwata, I Wayan Swendra, Fridayana Yudiaatmaja, “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan*”, Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal, adalah suatu penelitian yang menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan sebab akibat dan pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain. Penelitian mengenai pengaruh dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara negatif berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Penelitian mengenai pengaruh dari variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. pengaruh dari variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.<sup>155</sup>
2. Sussy Susanti, “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel, Dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat*”. Dalam estimasi pemodelan menunjukkan

---

<sup>155</sup> Fridayana Yudiaatmaja, I Made Parwata, I Wayan Swendra, *Op.cit.*,

bahwa secara parsial PDRB mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi PDRB di suatu kabupaten/kota akan meningkatkan kemiskinan. Dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam estimasi pemodelan menunjukkan bahwa secara parsial Pengangguran mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi pengangguran di suatu kabupaten/kota akan meningkatkan kemiskinan. Dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam estimasi pemodelan menunjukkan bahwa secara parsial IPM mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi IPM di suatu kabupaten/kota akan menurunkan kemiskinan.<sup>156</sup>

3. A.N.B. Dwirandra, Ni Luh Nana Putri Ani, "*Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*", Penelitian ini menggunakan sampel 8 kabupaten dan 1 kota pada Provinsi Bali dengan objek penelitian yaitu kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan tahun 2007-2011. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *sampling jenuh* dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis regresi linier berganda. Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian

---

<sup>156</sup>Sussy Susanti, "*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel, Dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat*", Jurnal Matematika Integratif, Vol. 9 No. 1, April 2013, h. 16.

menunjukkan bahwa berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya antara kinerja keuangan terhadap pengangguran, menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, sedangkan antara kinerja keuangan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemiskinan, dan rasio efektivitas, rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.<sup>157</sup>

4. Yarlina Yacoub, “*Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*”, Penelitian ini berbasis pada penelitian *diskriptif* dan *eksplanatory*. Dikatakan *diskriptif* karena penelitian ini menggambarkan objek yang diteliti. Selanjutnya penelitian ini menguji hubungan antar variabel, maka penelitian ini tergolong penelitian *eksplanatory* yaitu penelitian yang bermaksud untuk menguji dan menjelaskan hubungan antar variabel bebas (*exogen variable*) dan variabel terikat (*endogen variable*). Terdapat 2 (dua) variabel yang akan diteliti yaitu : tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, dengan teknik analisis regresi, Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan

---

<sup>157</sup>A.A.N.B. Dwirandra, Ni Luh Nana Putri Ani *Op. Cit.*, 495.

kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data empiris menunjukkan pola hubungan yang tidak selalu searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.<sup>158</sup>

5. Handayani Megasari, Syamsul Amar, Idris, “*Analisis Perekonomian Dan Kemiskinan Di Indonesia*”, secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat dan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingginya laju inflasi bisa menaikkan ukuran garis kemiskinan. Selanjutnya, secara parsial pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan dan negatif antara pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan ini mengindikasikan bahwasanya kemiskinan di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah. Dan secara parsial, upah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini terjadi karena rata-rata upah yang ditetapkan di Indonesia masih cenderung rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan rata-rata rumah tangga penduduk di Indonesia. Selanjutnya, pengaruh pendidikan (*mean years schooling*) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Todaro. Selanjutnya, secara parsial pengangguran berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Lincoln menyatakan

---

<sup>158</sup>Yarlina Yacoub, *Op. Cit*, h. 181.

bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan.<sup>159</sup>

Beberapa Penelitian mengenai kemiskinan di kabupaten/kota ataupun provinsi diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Lampung, variabel independen dalam yang diteliti adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengangguran dan Upah Minimum sedangkan yang menjadi variabel dependen nya dalam penelitian yang peneliti teliti adalah Kemiskinan, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum terhadap tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

---

<sup>159</sup> Handayani Megasari, Syamsul Amar, Idris, "Analisis Perekonomian dan Kemiskinan Di Indonesia" h, 15-16.

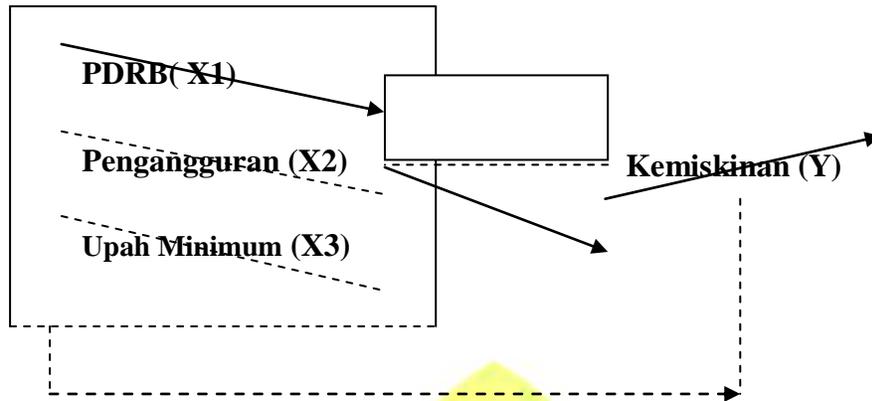
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan meningkat dan terbebas dari kemiskinan.

**GAMBAR 2.1**

**Kerangka Berpikir**



**G. Hipotesis**

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

1. Indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah yakni PDRB per kapita. Norton menyatakan bahwa apabila pertumbuhan PDRB yang tinggi dan PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak pekerjaan yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pemungutan pajak yang lebih besar dari yang memungkinkan pemerintah untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat miskin.<sup>160</sup> Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_{a1}$ : PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

---

<sup>160</sup>Made Tony Wirawan, Sudarsana Arka, *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapita dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali*, E-Jurnal Ep Unud, Vol 4, No 5, h. 551.

2. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (*income poverty rate*) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (*consumption poverty rate*). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.<sup>161</sup> Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha<sub>2</sub>. Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

3. Upah Minimum merupakan usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.<sup>162</sup> Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>161</sup>Diah Retnowati, Harsuti, *Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah*, h. 610.

<sup>162</sup>Sudirman, Lili Andriani, *Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi*, *Jurnal Of Economics And Business* Vol.1 No.1 September 2017, h. 149.

Ha<sub>3</sub>:Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

4. Sehingga dari penjelasan teori diatas tentang hubungan antara PDRB, Pengangguran, dan upah Minimum terhadap Kemiskinan secara simultan atau bersama-sama maka dapat disimpulkan hipotesisnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ha<sub>4</sub>:PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Sifat dan Jenis Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>163</sup>

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan indikator makro ekonomi yaitu tentang PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum, juga tentang Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, data dari dinas terkait seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta data dari jurnal dan artikel.<sup>164</sup> Yang

---

<sup>163</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 8.

<sup>164</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

berkaitan dengan data PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum, serta Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *asosiatif* (hubungan), adalah suatu metode penelitian yang bersifat menghubungkan dua variabel atau lebih. Permasalahan *asosiatif* dapat berupa: hubungkan sebab-akibat, hubungkan saling mempengaruhi dan hubungkan sejajar, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengaruh antara variabel bebas yaitu PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan penelitian ini, maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

### B. Jenis dan Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis pengaruh PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh peneliti tertentu. Data sekunder dapat berasal dari data-

data Badan Pusat Statistik (BPS), selain itu data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber-sumber diluar instansi yang dipublikasikan seperti Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurnal, artikel, Al-Qur'an dan Al-Hadis dan Internet. Dalam hal ini berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan berupa data *time series* dari Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015 yaitu yang terdiri dari data PDRB Harga Konstan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum, dan Kemiskinan yang tersusun dari Tahun 2013-2015.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam teknik pengumpulan data, untuk mengumpulkan data dan informasi peneliti ini menggunakan metode:

#### **1. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, dan mencatat yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total PDRB, total Pengangguran, dan Upah Minimum, serta Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

#### **2. Studi Pustaka**

Studi Pustaka (atau sering disebut juga studi literatur –*literatur review*) merupakan sebuah proses mencari berbagai literatu, hasil kajian atau studi

yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>165</sup> Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan sumber-sumber lain seperti buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini.<sup>166</sup>

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan objek dan subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.<sup>167</sup> Populasi himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi kriteria tertentu.<sup>168</sup> Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah laporan periodik tahunan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Data PDRB, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum, dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau

---

<sup>165</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Cet . 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 46.

<sup>166</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Buana Press, 2015), h. 157.

<sup>167</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>168</sup> Dr. Hj. Sedarmayanti, M. Pd., Drs Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 121.

kriteria tertentu.<sup>169</sup> Dalam penentuan menggunakan *Purposive Sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan yaitu seluruh data yang masih tersedia dan dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik yaitu data dalam bentuk laporan angka PDRB, angka Pengangguran, Upah Minimum, dan angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang diambil menjadi sampel adalah 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2013-2015, alasan penulis mengambil mengambil data Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 dikarenakan ditahun-tahun sebelumnya Provinsi Lampung selalu mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, sedangkan ditahun 2013-2015 justru mengalami kenaikan penduduk miskin yang cukup tinggi.

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>170</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan sampel tiga tahun terakhir yaitu tahun 2013-2015.

## **E. Definisi Operasional Variabel**

Peneliti menggunakan tiga variabel yaitu variabel dependen dan satu variabel independen.

### **1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)**

Variabel terikat (dependen) sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang di pengaruhi atau menjadi akibat, karena

---

<sup>169</sup> Sugiyono, *Op. Cit*, h.85.

<sup>170</sup> *Ibid*, h. 81.

adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kemiskinan.

## 2. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>171</sup>

Variabel independen dalam penelitian ini adalah data PDRB, data Pengangguran, dan data Upah Minimum yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung .

**Tabel 3.1**  
**Daftar Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Rumus	Skala Pengukuran Variabel
PDRB (X1)	Total PDRB atas harga konstan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	Perhitungan PDRB atas harga konstan: dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.	Rasio
Tingkat Pengangguran (X2)	Total Pengangguran Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	$TPT: (\text{Jumlah Pengangguran}) / (\text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$	Rasio
Upah Minimum (X3)	Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	Batas terendah dari penerimaan pekerja/karyawan (dalam satuan rupiah) yang dibayar perusahaan/kantor/majikan pada suatu daerah.	Rasio
kemiskinan (Y)	Total Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	$GK = GKM + GKNM$	Rasio

Sumber: data diolah dari sumber asli tahun 2018

<sup>171</sup> Sugiyono, *Op. Cit*, h. 38.

Skala Pengukuran Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Rasio. Dimana Skala Rasio merupakan skala interval dan memiliki nilai dasar (*based value*) yang tidak dapat dirubah. Data yang dihasilkan dari skala rasio disebut data rasio dan tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Variabel yang diukur dengan skala rasio disebut variabel metrik. Variabel yang diukur dengan skala rasio disebut variabel matrik. Sehingga skala pengukuran variabel yang cocok dalam penelitian ini adalah rasio.

## **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi berganda biasa berupa garis lurus (linier) dan non linier. Sementara analisis regresi pada penelitian ini adalah regresi linier berganda yaitu regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel (X) yaitu PDRB, Pengangguran, Upah Minimum dan satu variabel (Y) yaitu Kemiskinan. Dalam analisis penelitian ini akan dibantu dengan menggunakan aplikasi komputer berupa *Eviews 8* untuk menjawab, menarik kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah di dalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). pada analisis regresi

untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. apabila data regresi sudah melewati empat masalah dalam uji asumsi klasik maka data dapat dikatakan lulus uji asumsi.

**a) Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang berdistribusi normal. Output *Eviews* menyatakan bahwa nilai jarque bera test ( $<2$ ), maka data berdistribusi secara normal. Kemudian nilai probability ( $>5\%$ ) sehingga dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal.<sup>172</sup>

**b) Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas ditemukan oleh Ragner Frish tahun 1934. Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi diantara variabel independen. Apabila terjadi multikolinieritas atau hubungan linier yang sempurna (*perfect*) atau pasti (*exart*) di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi, maka akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Hasil *output Eviews*

---

<sup>172</sup> Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS, h. 2.

dapat dinyatakan dengan melihat *Contered VIF*, apabila nilai VIF tidak lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.<sup>173</sup>

**c) Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi adalah korelasi (hubungan) antara anggota seringkali observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Hasil *Eviews* menyatakan bahwa apabila nilai *prob. Chi square* sebesar ( $>5\%$ ) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah autokorelasi.<sup>174</sup>

**d) Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan residual atau pengamatan yang lain. Jika *variance* dan residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Beberapa metode untuk mengidentifikasi masalah heteroskedastisitas adalah:

1. Uji white
2. Uji park
3. Uji glajser

---

<sup>173</sup> Mansuri, *Modul Pratikum Eviews 9*, (jakarta: Universitas Borobudur,2016) h. 31.

<sup>174</sup> *Ibid*, h. 27

Hasil *Eviews* menyatakan apabila nilai *prob chi-square* sebesar (>5%) maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.<sup>175</sup>

## 2. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang khas untuk jenis penelitian *asosiatif*. Analisis regresi bertujuan yang mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Hubungan atau pertautan antara dua variabel atau lebih tersebut dinyatakan dalam persamaan matematika berikut<sup>176</sup>:

$$\text{Model regresi: } Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan

$a$  : Konstanta atau besarnya koefisien sama dengan nol

$b_1$  : Besarnya pengaruh PDRB

$b_2$  : Besarnya pengaruh Pengangguran

$b_3$  : Besarnya pengaruh Upah Minimum

$X_1$  : Variabel PDRB

$X_2$  : Variabel Pengangguran

$X_3$  : Variabel Upah Minimum

$Y$  : Kemiskinan

$E$  : *Factor Error*

---

<sup>175</sup> Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS, h. 24.

<sup>176</sup> Modul ekonometrika, hlm. 41-43.

### 3. Uji hipotesis

#### a. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji ini dilakukan untuk membandingkan pada tingkat nilai signifikan dengan nilai  $\alpha$  (5%) pada tingkat derajat 5% pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai sig  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Sig  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak
- 2) Jika nilai sig  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima

#### b. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan derajat keabsahan 5%.<sup>177</sup> Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai sig  $< \alpha$  maka  $H_0$  ditolak
- 2) Jika nilai sig  $> \alpha$  maka  $H_0$  diterima

#### c. Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya ( $R^2$ ). Jika determinasi totalnya ( $R^2$ ) yang diperoleh mendekati satu (1) maka dapat dikatakan

---

<sup>177</sup> *Ibid*, h. 37.

semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi ( $R^2$ ) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel-variabel bebas terhadap terikat.<sup>178</sup>



---

<sup>178</sup> *Ibid*, h. 16.

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 adalah merupakan Keresidenan Lampung, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibukota Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 telah diganti namanya menjadi Kotamadya Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah Kecamatan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kabupaten Lampung Barat dengan Ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 2.142,78 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
- b. Kabupaten Tanggamus dengan Ibukotanya Kota Agung, luas wilayahnya 3.020,64 Km<sup>2</sup> terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
- c. Kabupaten Lampung Selatan dengan Ibukotanya Kalianda, luas wilayahnya 700,32 Km<sup>2</sup> terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan.
- d. Kabupaten Lampung Timur dengan Ibukotanya Sukadana, luas wilayahnya 5.325,03 Km<sup>2</sup> terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan.

- e. Kabupaten Lampung Tengah dengan Ibukotanya Gunung Sugih, luas wilayahnya 3.802,68 Km<sup>2</sup> terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan.
- f. Kabupaten Lampung Utara dengan Ibukotanya Kotabumi, luas wilayahnya 2.725,87 Km<sup>2</sup> terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kecamatan.
- g. Kabupaten Way Kanan dengan Ibukotanya Blambangan Umpu, luas wilayahnya 3.921,63 Km<sup>2</sup> terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan.
- h. Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukotanya Menggala, luas wilayahnya 3 466,32 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan.
- i. Kabupaten Pesawaran dengan Ibukota Gedong Tataan, luas wilayahnya 2.243,51 Km<sup>2</sup> terdiri dari 11 (Kecamatan) kecamatan.
- j. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu, luas wilayahnya 625,00 Km<sup>2</sup> terdiri 9 (sembilan) kecamatan.
- k. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji, luas wilayahnya 2.184,00 Km<sup>2</sup> terdiri 7 (tujuh) kecamatan.
- l. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, luas wilayahnya 1.201,00 Km<sup>2</sup> terdiri 8 (delapan) kecamatan.
- m. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui., luas wilayahnya 2.907,23 Km<sup>2</sup> terdiri 11 (sebelas) kecamatan.
- n. Kota Bandar Lampung dengan luas wilayah 296 Km<sup>2</sup> terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan.
- o. Kota Metro dengan luas wilayah 61,79 Km<sup>2</sup> terdiri dari 5 (lima ) kecamatan.

## 2. Geografi

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km<sup>2</sup> termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatera, dan dibatasi oleh:

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di Sebelah Utara.
- Selat Sunda, di Sebelah Selatan.
- Laut Jawa, di Sebelah Timur.
- Samudra Indonesia, di Sebelah Barat.

Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjung Karang dan Teluk Betung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Pelabuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.

Lapangan terbang utamanya adalah “Radin Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti”, 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan:

- Timur-Barat berada antara: 103° 40' -105° 50' Bujur Timur.
- Utara-Selatan berada antara: 6° 45' -3° 45' Lintang Selatan.

### 3. Sejarah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 maret 1964 dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 3/1964 yang kemudian menjadi undang-undang nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan provinsi Sumatera Selatan.

Kendatipun provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman VOC daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda.

Secara administratif provinsi Lampung dibagi dalam 15 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur , Kabupaten Lampung Tengah , Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang , Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Sejak berdirinya provinsi Lampung tahun 1964 sampai saat initelah dijabat oleh 9 Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I berturut-turut sebagai berikut<sup>179</sup>:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Gubernur Provinsi Lampung Beserta Periode Jabatan**

No	Nama Gubernur Tingkat I	Periode
1	Koesno Danu Upoyo	1964 – 1966
2	Hi. Zaina Abidin PA	1966 – 1972
3	R. Soetiyoso	1972 – 1978
4	Yasir Hadibroto	1978 – 1988
5	Poedjono Pranyoto	1988 -1998
6	Drs. Oemarsono	1998 – 2002
7	Hari Sabarno	2002 – 2004
8	Drs. Hi. Sjachroeddin ZP,SH	2004 – 2008
9	Drs. Syamsura Ryacudu	2008 – 2009
10	Drs. Hi. Sjachroeddin ZP,SH	2009 – 2014
11	M. Ridho Ficardo, Spi, Msi	2014 – Sekarang

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Lampung Dalam Angka 2017 (data diolah)

## B. Gambaran Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *times series* atau rentang waktu mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) komputer Eviews 8 dengan metode analisis regresi linier berganda.

<sup>179</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Lampung Dalam Angka 2017. (Diakses tanggal 8 Januari 2019, pukul 22.36 WIB)

**Tabel 4.2**  
**Data Jumlah Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**  
**Tahun 2013-2015 (jiwa)**

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
		2013	2014	2015
1	Lampung Barat	60.810	60.270	42.200
2	Tanggamus	85.640	85.020	81.600
3	Lampung Selatan	162.970	161.790	157.700
4	Lampung Timur	172.210	170.730	170.100
5	Lampung Tengah	162.810	161.550	164.400
6	Lampung Utara	142.010	140.730	140.400
7	Way Kanan	65.180	64.500	63.100
8	Tulang Bawang	33.720	36.830	44.200
9	Pesawaran	74.600	74.010	75.400
10	Pringsewu	37.310	37.770	45.600
11	Mesuji	11.230	12.790	16.000
12	Tulang Bawang Barat	16.430	18.730	21.800
13	Bandar Lampung	102.750	102.270	100.800
14	Metro	17.080	16.950	16.200

*Sumber: BPS Lampung, Data dan Informasi Kabupaten/ Kota 2013-2015*

Berdasarkan tabel 4.2, Kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2013 sebesar 1.144.760 (jiwa), jumlah ini berkurang pada tahun 2014 sebesar 1.143.930 (jiwa), lalu Kemiskinan kembali bertambah sebesar 1.163.500 (jiwa) pada tahun 2015. Jika dilihat data diatas, Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten dengan tingkat Kemiskinan tertinggi setiap tahunnya, disusul dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan.

**Tabel 4.3**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**  
**Tahun 2013-2015 (Rupiah)**

No	WILAYAH	PDRB		
		2013	2014	2015
1	Lampung Barat	12.786.752	13.367.936	13.948.733
2	Tanggamus	14.233.991	14.891.386	15.525.671
3	Lampung Selatan	23.256.915	24.323.366	25.349.795
4	Lampung Timur	23.655.372	24.080.118	24.932.145
5	Lampung Tengah	28.661.554	29.982.739	31.292.006
6	Lampung Utara	20.146.032	21.179.537	22.205.934
7	Way Kanan	16.637.730	17.379.527	18.092.261
8	Tulang Bawang	27.667.957	28.791.296	29.827.876
9	Pesawaran	20.288.814	21.162.797	21.971.872
10	Pringsewu	15.065.901	15.769.758	16.430.958
11	Mesuji	26.664.675	27.960.681	29.213.990
12	Tulang Bawang Barat	22.072.136	23.051.128	24.063.892
13	Bandar Lampung	28.826.457	30.224.132	31.526.570
14	Metro	20.024.635	20.914.291	21.803.196

*Sumber: BPS Lampung, Data dan Informasi Kabupaten/ Kota 2013-2015*

Berdasarkan tabel 4.3, PDRB (Rupiah) Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2015. Pada tahun 2013-2014 kenaikan PDRB di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sekitar 4% atau Rp.1.000.000-Rp.1.500.000,., Tahun 2014-2015 kenaikan tidak berbeda dari Tahun 2013-2014, yaitu 4% atau Rp.1.000.000-Rp.1.500.000.

**Tabel 4.4**  
**Data Penduduk Usia 15+ Yang Termasuk Pengangguran Terbuka (Jiwa)**  
**Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015**

No	Wilayah	Penduduk Usia 15+ yang termasuk Pengangguran Terbuka (Jiwa)		
		2013	2014	2015
1	Lampung Barat	6.042	5.061	5.539
2	Tanggamus	12.864	13.251	16.071
3	Lampung Selatan	26.313	26.618	22.271
4	Lampung Timur	25.199	23.788	22.248
5	Lampung Tengah	20.184	15.776	18.599
6	Lampung Utara	19.374	16.651	21.307
7	Way Kanan	8.731	7.261	7.454
8	Tulang Bawang	7.994	8.276	10.033
9	Pesawaran	17.847	16.751	13.544
10	Pringsewu	6.392	6.452	6.913
11	Mesuji	7.745	738	4.447
12	Tulang Bawang Barat	4.511	6.357	3.399
13	Bandar Lampung	43.231	34.844	37.874
14	Metro	3.055	2.954	3.649

*Sumber: BPS Lampung, Data dan Informasi Kabupaten/ Kota 2013-2015*

Berdasarkan tabel 4.4, Angka Pengangguran di Provinsi Lampung mengalami fluktuatif. Jika di jumlah seluruhnya, tahun 2013 merupakan tahun dengan jumlah Pengangguran terbanyak, yaitu sebesar 209.482 (jiwa), ditahun 2014 angka pengangguran menurun menjadi 184.778 (jiwa), lalu pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi sebesar 196.850 (jiwa). Jika dilihat data diatas, Kota Bandar Lampung sebagai yang memiliki Pengangguran tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain. Selanjutnya disusul oleh Lampung Selatan dan Lampung Timur.

**Tabel 4.5**  
**Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015**  
**(Rupiah)**

No	Wilayah	data upah minimum kabupaten/kota (Rupiah)		
		2013	2014	2015
1	Lampung Barat	1.150.000	1.399.037	1.590.000
2	Tanggamus	1.150.000	1.399.037	1.581.000
3	Lampung Selatan	1.150.000	1.402.500	1.595.000
4	Lampung Timur	1.150.000	1.399.037	1.581.000
5	Lampung Tengah	1.154.000	1.400.000	1.588.000
6	Lampung Utara	1.150.000	1.399.037	1.581.000
7	Way Kanan	1.160.000	1.408.000	1.588.500
8	Tulang Bawang	1.155.000	1.401.000	1.588.500
9	Pesawaran	1.150.000	1.399.037	1.581.000
10	Pringsewu	1.150.000	1.399.037	1.581.000
11	Mesuji	1.150.000	1.399.037	1.581.000
12	Tulang Bawang Barat	1.150.000	1.408.000	1.581.000
13	Bandar Lampung	1.165.000	1.422.500	1.649.500
14	Metro	1.150.000	1.400.500	1.582.000

*Sumber: BPS Lampung, Data dan Informasi Kabupaten/ Kota 2013-2015*

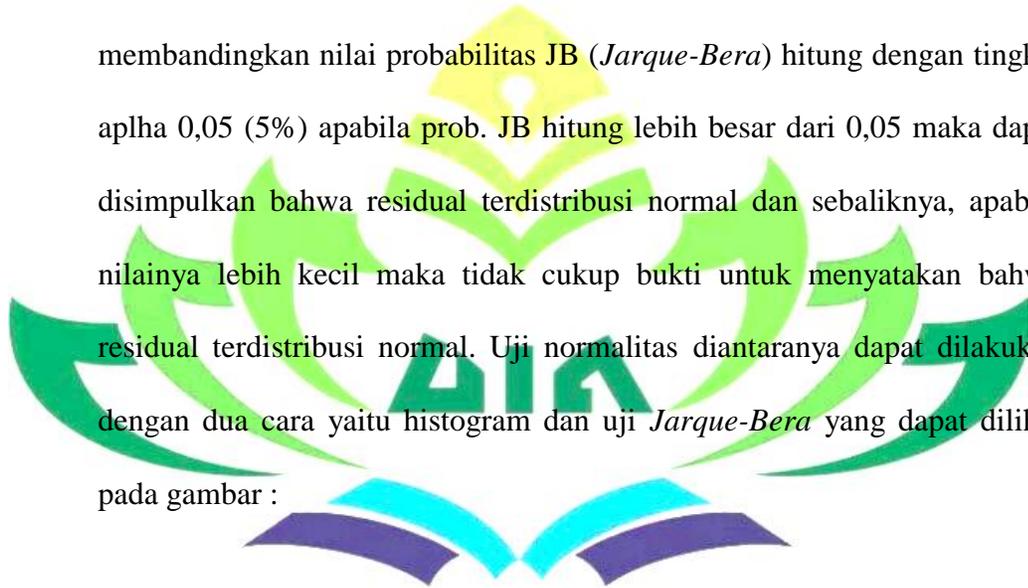
Berdasarkan tabel 4.6, data Upah Minimum tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dari data diatas pada Upah Minimum Provinsi Lampung pada Tahun 2013 sebesar Rp.1.150.000, meningkat pada Tahun 2014 sebesar Rp.1.399.037, dan pada Tahun 2015 sebesar Rp.1.581.000.

## C. Hasil Analisis Data

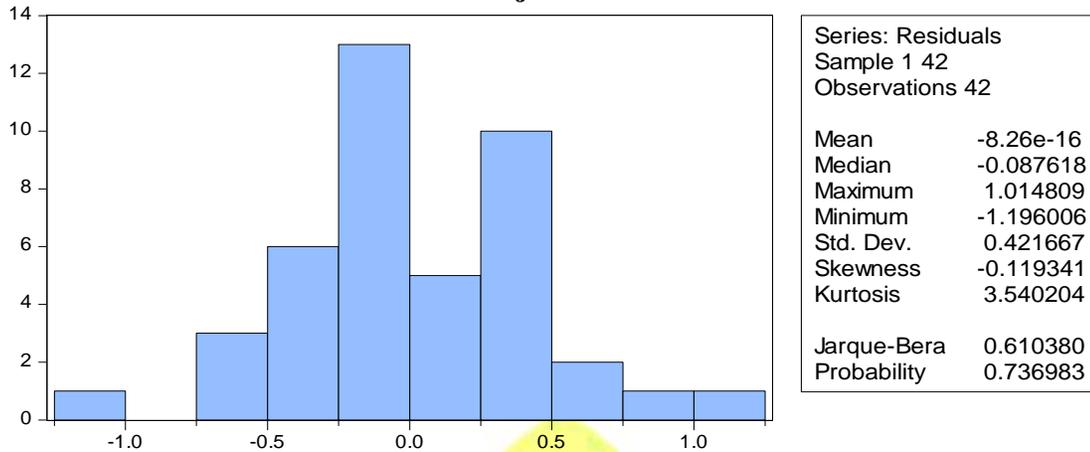
### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB (*Jarque-Bera*) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%) apabila prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Uji normalitas diantaranya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu histogram dan uji *Jarque-Bera* yang dapat dilihat pada gambar :



**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas**



Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018)

Berdasarkan gambar hasil olahan data menggunakan program Eviews 8, diperoleh hasil bahwa nilai  $J_b$  (*Jarque-Bera*) sebesar 0.610380 ( $<2$ ), maka data berdistribusi normal. Kemudian nilai probabilitas sebesar 0.736983 ( $>5\%$ ), dengan demikian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat terdapat gangguan atau tidak terhadap data dimana multikolinieritas terjadi apabila ada korelasi antar variabel independen. Dengan demikian uji ini dilakukan agar data yang ada harus terbebas dari gangguan multikolinieritas. Untuk menguji ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada tabel kolom *centered VIF*. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka dapat dikatakan tidak

terjadi multikolinieritas. Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	63.47067	13895.79	NA
X1	0.075552	4720.199	1.103395
X2	0.007169	135.5198	1.080054
X3	0.267709	11702.89	1.027997

Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa nilai Contered VIF variabel X1 (1.103395), X2 (1.080054) dan X3 (1.027997) kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan linier antara ketiga variabel atau tidak terjadi multikolinieritas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antara sesama variabel bebas yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ). Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan metode *breusch-Godfrey* atau lebih umum dan dikenal dengan uji *langrange multiplier* (LM). Adapun hasil dari pengolahan data sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.679121	Prob. F(2,35)	0.0827
Obs*R-squared	5.443447	Prob. Chi-Square(2)	0.0658

*Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018)*

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji autokorelasi *breusch-godfrey* dengan menggunakan Eviews 8, dapat diketahui bahwa nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0.0658 (> 5%) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tidak mengandung masalah autokorelasi.

**d. Uji Heterokedastisitas**

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain. Beberapa metode untuk mengidentifikasi masalah heterokedastisitas adalah:

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Park**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42.87467	41.98091	-1.021290	0.3136
X1	3.217489	1.448397	2.221415	0.0624
X2	0.098448	0.446150	0.220662	0.8265
X3	-1.088103	2.726448	-0.399092	0.6921

*Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018)*

Berdasarkan tabel 4.8 Hasil *Eviews* menyatakan bahwa nilai Prob. X1 sebesar 0.0624 (>5%), X2 memperoleh nilai Prob 0.8265 (>5%)

sedangkan pada X3 memperoleh nilai Prob. 0.6921 (>5%) maka data pada variabel X2 dan X3 maka mengindikasikan bahwa data tidak mengandung heteroskedastisitas.

## 2. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat

**Tabel 4.9**  
**Uji Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.084154	7.966848	0.638164	0.5272
X1	-0.586654	0.274867	-2.134321	0.0393
X2	0.916639	0.084667	10.82636	0.0000
X3	0.520304	0.517406	1.005600	0.3210
R-squared	0.756431	Mean dependent var		11.01074
Adjusted R-squared	0.737202	S.D. dependent var		0.854394
S.E. of regression	0.437995	Akaike info criterion		1.277176
Sum squared resid	7.289919	Schwarz criterion		1.442668
Log likelihood	-22.82070	Hannan-Quinn criter.		1.337836
F-statistic	39.33769	Durbin-Watson stat		1.304487
Prob(F-statistic)	0.000000			

Estimation Command:

LS Y C X1 X2 X3

Estimation Equation:

$$Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3$$

Substituted Coefficients:

$$Y = 5.08415361559 - 0.586653986827 * X1 + 0.916639099291 * X2 + 0.520303890908 * X3$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 5.08415361559 atau 5,08 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai nol, maka variabel kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 5.08415361559 atau 5,08.
- b. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi berganda koefisien regresi pada variabel PDRB bertanda negatif sebesar -0.586653986827 atau -0,59, menunjukkan apabila variabel PDRB mengalami peningkatan sebesar 1%, maka variabel kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,59%.
- c. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi berganda koefisien regresi pada variabel Pengangguran bertanda positif sebesar 0.916639099291 atau 0,92, menunjukkan apabila variabel Pengangguran mengalami peningkatan 1%, maka variabel kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,92%.
- d. Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi berganda koefisien regresi pada variabel Upah Minimum bertanda positif sebesar 0.520303890908 atau 0,52, menunjukkan apabila variabel Upah Minimum mengalami peningkatan 1%, maka variabel kemiskinan mengalami peningkatan 0,52%.

### 3. Hasil Uji Hipotesis

#### a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ). Apabila nilai Prob ( $F$ -statistic) lebih kecil dari

tingkat kesalahan/*error* ( $\alpha$ ) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai Prob (*F-statistic*) lebih besar dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak. Adapun hasil dari pengolahan data sebagai berikut:

$H_{a4}$ :PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

$H_{04}$ :PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji F**

R-squared	0.756431	Mean dependent var	11.01074
Adjusted R-squared	0.737202	S.D. dependent var	0.854394
S.E. of regression	0.437995	Akaike info criterion	1.277176
Sum squared resid	7.289919	Schwarz criterion	1.442668
Log likelihood	-22.82070	Hannan-Quinn criter.	1.337836
F-statistic	39.33769	Durbin-Watson stat	1.304487
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018)*

Berdasarkan hasil uji f dapat dilihat pada tabel 4.10 diatas, maka diperoleh nilai Prob. (*F-statistic*) sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang

diestimasi layak untuk menjelaskan pengaruh PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan.

$H_{a1}$ :PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel  $X_1$  (PDRB),  $X_2$  (Pengangguran), dan  $X_3$  (Upah Minimum) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel  $Y$  (Kemiskinan) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

**b. Uji Signifikan Parsial (Uji T)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Apabila nilai Prob. lebih kecil dari tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan apabila nilai Prob lebih besar dari nilai kesalahan 0,05 dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hasil dari pengolahan data sebagai berikut:

1.  $H_{a1}$ :PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

$H_{o1}$ :PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

2.  $H_{a2}$ : Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

$H_{02}$ : Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

3.  $H_{a3}$ : Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

$H_{03}$ : Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji T**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.084154	7.966848	0.638164	0.5272
X1	-0.586654	0.274867	-2.134321	0.0393
X2	0.916639	0.084667	10.82636	0.0000
X3	0.520304	0.517406	1.005600	0.3210

Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018)

Berdasarkan tabel 4.11 bahwa nilai Prob dari variabel X1 (PDRB) sebesar 0.0393 lebih kecil dari 0,05 ( $0.0393 < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015. Ini berarti  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{01}$  ditolak.

Variabel X2 (Pengangguran) memperoleh nilai Prob sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 ( $0.0000 < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan

Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015. Ini berarti  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{02}$  ditolak.

Berbeda nilai dengan variabel X3 (Upah Minimum) memperoleh nilai Prob sebesar 0.3210 lebih besar dari 0,05 ( $0.3210 > 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015. Ini berarti  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{03}$  ditolak.

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *R-Square* atau *Adjusted R-Square*.

**Tabel 4.12**  
**koefisien determinasi ( $R^2$ )**

R-squared	0.756431	Mean dependent var	11.01074
Adjusted R-squared	0.737202	S.D. dependent var	0.854394
S.E. of regression	0.437995	Akaike info criterion	1.277176
Sum squared resid	7.289919	Schwarz criterion	1.442668
Log likelihood	-22.82070	Hannan-Quinn criter.	1.337836
F-statistic	39.33769	Durbin-Watson stat	1.304487
Prob(F-statistic)	0.000000		

*Sumber: Output Eviews 8 (data sekunder diolah tahun 2018)*

Nilai *R-Square* pada tabel 4.10 besarnya adalah 0.756431 menunjukan bahwa proporsi pengaruh variabel X1 (PDRB), X2 (Pengangguran) dan X3

(Upah Minimum) sebesar 76% sedangkan sisanya 24% (100% - 76%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pengaruh secara parsial PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015**

Pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat pengaruh variabel PDRB, Pengangguran, dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015, akan diuraikan sebagai berikut:

###### **a. Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015**

Hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikan PDRB sebesar 0.0393 lebih kecil bila dibandingkan dengan  $\alpha$  (0,05), sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan demikian variabel PDRB ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2013-2015.

Peningkatan PDRB tidak selalu diikuti dengan menurunnya angka Kemiskinan, peningkatan PDRB justru mengakibatkan meningkatnya juga angka Kemiskinan. Seperti yang terlihat di Kabupaten/Kota: Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang.

Sedangkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan PDRB dan penurunan Kemiskinan terletak di Kabupaten/Kota berikut: Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Waykanan, Bandar Lampung, Metro.

Kabupaten/Kota yang mengalami Kemiskinan yang berfluktuatif tiap tahun adalah, namun PDRB selalu mengalami peningkatan adalah Pesawaran dan Lampung Tengah. Selama kurun waktu 2013-2015 Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB Provinsi Lampung di dominasi oleh Kota Bandar Lampung hal tersebut bisa dilihat dari tingginya PDRB Kota Bandar Lampung dari Tahun 2013-2015 dengan rata-rata nilai PDRB sebesar Rp.30.192.386,33, kemudian Kabupaten Lampung Tengah dengan rata-rata sebesar Rp.29.978.766,33, dan Kabupaten Tulang Bawang dengan rata-rata sebesar Rp.28.762.376,33. Sedang kan nilai PDRB paling rendah terdapat di Kabupaten Lampung Barat dengan rata-rata nilai PDRB sebesar Rp.13.367.807.

Nilai PDRB di Provinsi Lampung pada Tahun 2013-2015 selalu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan namun mampu untuk mengurangi Kemiskinan di Provinsi Lampung. Untuk meningkatkan peran pemerintah dalam mengelola PDRB pihak pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam hal PDRB sebagai skala prioritas dalam upaya menanggulangi tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. Syarat kecukupannya adalah pertumbuhan PDRB efektif dalam

mengurangi tingkat Kemiskinan. Artinya pertumbuhan PDRB harus menyebar disetiap golongan, termasuk digolongan penduduk miskin di Provinsi Lampung. Distribusi yang adil dan merata dari hasil pertumbuhan PDRB akan berdampak pada terciptanya pembangunan di segala sektor lapangan pekerjaan dan berpotensi mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, pertumbuhan PDRB disetiap sektor lapangan usaha sangatlah penting dalam mengurangi dan menanggulangi kemiskinan di Provinsi Lampung.

**b. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.**

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Pengangguran ( $X_2$ ) sebesar 0.0000 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi  $\alpha$  (0,05) menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi ( $0.0000 < 0,05$ ) sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2013-2015.

Pengangguran tertinggi dalam kurun waktu 2013-2015 terletak pada Kota Bandar Lampung dengan rata-rata 38.649 ribu jiwa dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 101.940 ribu jiwa, Pengangguran tertinggi kedua Kabupaten Lampung Selatan dengan rata-rata 25.067 ribu jiwa dengan rata-rata tingkat Kemiskinan sebesar 160.820 ribu jiwa, menyusul dengan Kabupaten Lampung Timur di urutan ketiga dengan tingkat

Pengangguran rata-rata 23.745 ribu jiwa dengan rata-rata tingkat Kemiskinan sebesar 171.013 ribu jiwa, Sedangkan dengan tingkat Pengangguran terendah berada di Kota Metro dengan rata-rata 3.219 ribu jiwa dengan rata-rata tingkat Kemiskinan sebesar 16.743 ribu jiwa.

Pengangguran bisa diartikan sebagai tingkat produktivitas seseorang yang rendah atau bisa juga tidak melakukan produktivitas sama sekali. Hal ini karena pengangur tidak memiliki suatu pekerjaan untuk menghasilkan upah ataupun gaji. Padahal sebagian besar rumah tangga bergantung dari gaji/upah yang didapat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

**c. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.**

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Upah Minimum ( $X_3$ ) sebesar 0.3210 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi  $\alpha$  (0,05) menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan taraf signifikansi ( $0.3210 > 0,05$ ) sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2013-2015.

Upah Minimum setiap tahunnya mengalami peningkatan upah tertinggi setiap tahunnya didominasi oleh kota Bandar Lampung dengan upah tertinggi ditahun terakhir atau tahun 2015 sebesar Rp.1.649.500,- Upah tertinggi kedua berada di Kabupaten Lampung Selatan dengan Upah

sebesar Rp.1.595.000,- dan tertinggi ketiga berada Kabupaten Lampung Barat dengan Upah sebesar Rp.1.590.000,- untuk Kabupaten/Kota lainnya sebesar Rp.1581.000 mereka mengikuti Upah Minimum Provinsi yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

kebijakan Upah Minimum yang diterapkan pemerintah untuk memproteksi atau melindungi buruh atau pekerja agar mencapai KHL atau kebutuhan hidup layak kenaikan.

## **2. Pengaruh Simultan PDRB, Pengangguran Dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2015**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan model regresi linier berganda dimana Uji Signifikan Simultan (Uji F) diperoleh hasil Prob. (*F-statistic*) sebesar 0.000000 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi layak untuk menjelaskan pengaruh PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel X1 (PDRB), X2 (Pengangguran), dan X3 (Upah Minimum) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kemiskinan) di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada Tahun 2013-2015. Maka dapat dikatakan dalam penelitian ini  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak.

Selanjutnya dari analisis regresi linier berganda diperoleh nilai R-Squared sebesar 0.756431. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1), Pengangguran (X2), dan Upah

Minimum (X3) mempunyai keeratan hubungan dengan variabel Kemiskinan (Y) dan memiliki kontribusi sebesar 75,64 persen, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.

### 3. Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Kemiskinan dalam pengertian konvensional merupakan pendapatan (*income*) dari suatu kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh karena itu seringkali berbagai upaya pengentasan kemiskinan hanya berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan seringkali dipahami dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu keadaan kekurangan uang, rendahnya pendapatan, dan tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari.

Kemiskinan adalah sumber kemunduran. Islam bahkan telah menjadikan kemiskinan itu sebagai ancaman dari setan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:268)

Pada zaman Rasulullah sendiri orang-orang miskin memperoleh bantuan materi dari kas negara yang ditangani secara profesional. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah dan masyarakat Indonesia bersinergi menanggulangi kemiskinan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara dan masyarakat. Islam sesungguhnya sudah jelas memberikan solusi untuk menangani masalah kemiskinan. Islam memiliki beberapa prinsip dalam kegiatan berekonomi, yaitu:

a. Prinsip Tauhid (Keimanan)

Tauhid adalah pondasi dalam ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (Mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan di pertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

b. Prinsip Adl (Keadilan)

Di antara pesan-pesan Al-Quran (sebagai sumber hukum Islam) adalah menegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab Adl yang secara Harfiah bermakna sama. Ditinjau dari definisi KBBI, adil berarti sama

berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Prinsip Adl ini harus mendapatkan pelayanan yang sama baik. Keadilan dalam ekonomi *Syari'ah* diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.

c. Prinsip Nubuwwah (Kenabian)

Untuk umat Islam, Allah telah mengirimkan manusia panutan (model) yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Sifat-sifat utama sang junjungan yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis. Khususnya pada sifat Sidiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, dipercaya, kredibilitas), Fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan Tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

d. Prinsip Khilafah (Pemimpin)

Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Hal ini berlaku bagi setiap manusia, baik sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau pemimpin Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat kehilangan, atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah

memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

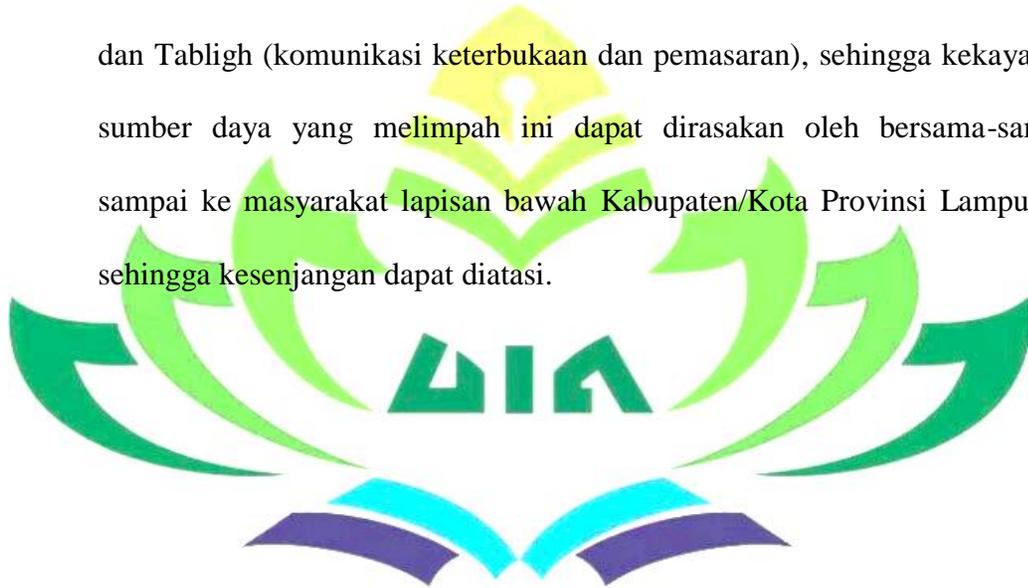
Dari penjelasan diatas kegiatan berekonomi diperlukan prinsip-prinsip ekonomi islam agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan cara Islam dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Lampung. Meningkatnya Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung disebabkan karena kurangnya pemerintah menjalankan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam kegiatan berekonominya.

Ketimpangan antara pihak kaya dan miskin yang menyebabkan kekacauan. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan akan membuat jurang pemisah antara si kaya dan miskin. Apabila dibiarkan terlalu lama maka akan mengakibatkan masalah kemiskinan semakin meningkat. Al-Quran menyerukan agar orang-orang kaya menolong orang miskin karena di dalam kekayaan orang-orang kaya ada hak orang miskin, seperti yang tertuang dalam surat Adh-Dharyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.” (Q.S Adh-Dharyat:19)

Dalam kegiatan ekonomi prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi pemecah dari permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Dibutuhkannya seorang Khalifah (pemimpin) dalam mengelola sumber daya yang sangat melimpah yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Sosok seorang Khalifah (pemimpin) yang adil, dan mencontoh sifat-sifat nabi yaitu Sidiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, dipercaya), Fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan Tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran), sehingga kekayaan sumber daya yang melimpah ini dapat dirasakan oleh bersama-sama sampai ke masyarakat lapisan bawah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sehingga kesenjangan dapat diatasi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian pengaruh PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2013-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis regresi berganda kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut:
  - a. Secara parsial dari hasil uji signifikan (uji t) pada variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.
  - b. Variabel Pengangguran berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015.
  - c. Selanjutnya untuk Variabel Upah Minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015. Kenaikan Upah Minimum belum efektif dalam mengurangi Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
  - d. Berdasarkan hasil uji penelitian menggunakan regresi linier berganda, dapat dinyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel PDRB, Pengangguran dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap variabel Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015 dengan signifikan. Selain itu berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya variabel PDRB,

Pengangguran, dan Upah Minimum untuk menerangkan variabel dependen Kemiskinan sebesar 0.756431 atau 76% dan sisanya yaitu 24% dipengaruhi oleh faktor makro lainnya seperti banyaknya jumlah penduduk, rendahnya pendidikan.

2. Ketimpangan antara pihak kaya dan miskin yang menyebabkan kekacauan. Adanya ketimpangan distribusi pendapatan akan membuat jurang pemisah antara si kaya dan miskin. Apabila dibiarkan terlalu lama maka akan mengakibatkan masalah kemiskinan semakin meningkat. Al-Quran menyerukan agar orang-orang kaya menolong orang miskin karena di dalam kekayaan orang-orang kaya ada hak orang miskin. Dalam kegiatan ekonomi prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi pemecah dari permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Dibutuhkannya seorang Khalifah (pemimpin) dalam mengelola sumber daya yang sangat melimpah yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Sosok seorang Khalifah (pemimpin) yang adil, dan mencontoh sifat-sifat nabi yaitu Sidiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, dipercaya), Fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan Tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran), sehingga kekayaan sumber daya yang melimpah ini dapat dirasakan oleh bersama-sama sampai ke masyarakat lapisan bawah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sehingga kesenjangan dapat diatasi.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dan kesimpulan yang didapat maka, beberapa saran yang dapat diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Provinsi Lampung, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Lampung, serta diharapkan lebih memberikan perhatian khusus terhadap penduduk miskin yang ada di kabupaten/kota Provinsi Lampung.
2. Bagi akademisi dan penelitian selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan data yang diperoleh dan periode waktu yang digunakan hanya 3 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambahkan variabel bebas lainnya dan tahun penelitian, sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Bagi publik, meningkatnya serta tingginya upah minimum disuatu daerah membuat perusahaan mengurangi dan membatasi tenaga kerja yang diperkerjakan, besarnya dan tingginya upah yang harus di bayarkan kepada pekerjanya, hal ini akan berdampak pada kurangnya penyerapan tenaga kerja yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Upah yang meningkat diikuti dengan meningkatnya angka pengangguran yang terus-menerus tanpa adanya

penanggulangan atau tindakan dari pemerintah, akan meningkatkan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet. Ke- 10*, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya Cet. Ke- 10*, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.
- Faisal H. Basri. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta:Erlangga.
- Gregory Mankiw. 2000. *Pengantar Ekonomi*. Jilid 2, Jakarta:Erlangga.
- Iqbal Hasan. 2008. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Keppi Sukei. 2015. *Gender dan Kemiskinan di Indonesia*. Cet 1, Malang:Universitas Brawijaya Press.
- Lincoln Arsyat. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.
- Mansuri. 2016. *Modul Pratikum Eviews*. Jakarta : Universitas Borobudur.
- Modul ekonometrika analisis dan pengolahan data dengan spss dan eviews*.  
*Modul Ekonometrika*, 2016.
- Mudrajad Kuncoro. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta:Erlangga.
- Mustafa Edwin Nasution et. Al. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Cet 3*. Jakarta:Prenada Media Group.
- N. Gregory Mankiw. 2000. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi 4, Jakarta:Erlangga.
- Nanang Martono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia, nomor 78 tahun 2015, *tentang pengupahan*, pasal 1.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia, nomor 78 tahun 2015, *tentang pengupahan*, pasal 41.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Prathama Rahadja. 2008. Mandala Manurung. Pengantar Ilmu Ekonomi. Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sadono Sukirno. 2015. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sam F. Poli, M.A. 2005. *Memberdayakan Kaum Miskin*. Yogyakarta.

Sedarmayanti, M. Pd., Drs Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung:Mandar Maju.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Wijayanti Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta:Sinar Grafika.

Wiratna sujarweni. 2015. *metodologi penelitian bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: pustaka press.

M. Alhudori. *pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin provinsi jambi*. *jurnal Of Economics and Business*. Vol. no 1. september 2017.

Nunung Nurwati. *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran. Vol. 10, No. 1. Januari 2008.

A.A.N.B. Dwirandra, Ni Luh Nana Putri Ani. “*Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas. Udayana 6.3 2014.

Agussalim, Siti Walida Mustamin, Sri Undai Nurbayani. “*Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*”. Jurnal Analisis. Vol. 4 No. 2. Desember. 2015.

Ali Murtadho. *Solusi Problem Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 28. No.1. Januari-Juni 2008.

Anak Agung Istri Diah Paramita, Ida Bagus Putu Purbadharmaja. *Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ep Unud. 4 [10].

Ardhian Kurniawati, Beni Teguh Gunawan, Disty Putri Ratna Indrasari, *Dampak Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014*, *Journal Of Research In Economics and Management*, Volume 17, No. 2, Juli – Desember

Bayu Tri Cahya. *Kemiskinan Ditinjau Dari Perpekstif Al-Quran dan Hadis*. Jurnal Penelitian. Vol. 9. No. 1. Februari 2015.

Candra Mustika. “*Pengaruh PDB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 1990-2008*”. Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol.1. No.4 Oktober 2011.

Daryono Soebagiyo. ”*Kausalitas Granger PDRB Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Dati I Jawa Tengah*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8. No. 2. Desember 2007.

Diah Retnowati, Harsuti. *Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah*.

Dicky Wahyudi, Tri Wahyu Rejekingsih. *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. Diponegoro Journal Of Economics. Vol 2. No 1. Tahun 2013.

Durrotul Mahsunah. “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*”

Endah Ernany Triariani. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Berau*. Jurnal Ekonomi.

Firi Amalia. “*Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Dikawasan Timur Indonesia (Kti) Perionde 2000-2010*”. Econosains Vol 10. No 2. Agustus 2012.

Fridayana Yudiaatmaja, I Made Parwata, I Wayan Swendra. ”*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Tingkat Pengangguran Terbuka*

*Terhadap Tingkat kemiskinan.* e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen. Vol 4. Tahun 2016.

Fuad Riyadi. *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam.* Iqtishadia. Vol 8. No. 1. Maret 2015.

Handayani Megasari, Syamsul Amar, Idris. “*Analisis Perekonomian dan Kemiskinan Di Indonesia*”.

Himawan Yudistira Dama, Agnes L Ch Lopian, Jacline I. Sumual. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado (Tahun 2005-2014).* Vol 16. No. 03 Tahun 2016.

Indra Maipita. “*Simulasi Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan*”. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*— Vol 17. No 3. September 2013.

Ischak P. Lumbantobing. “*Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Produk Domestik Bruto Di Dki Jakarta*”. *Journal Of Research In Economics And Management (Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen).* Volume 17. No. 1. Januari – Juni.

Made Tony Wirawan, Sudarsana Arka. *Analisis Pengaruh Pendidikan, PDRB Perkapita dan Tingkat Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali.* E-Jurnal Ep Unud. Vol 4. No 5.

Maimun Sholeh. *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah:Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia.* *Jurnal Ekonomi & Pendidikan.* Vol 4. No 1. April 2007.

Meilen Gleri Paseki, Amran Naukoko, Patrick Wauran. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004- 2012.* *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.* Vol 14. no. 3. Oktober 2014.

Murtadho. *Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam.* *Jurnal Equilibrium.* Vol 1. No.2. Desember 2013.

Nursiah Chalid, Yusbar Yusuf. “*Pengaruh Tingkat Kemiskinan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau*”. *Jurnal Ekonomi* Vol 22. No 2. Juni 2014.

- Joni Tamkin Bin Borhan. *Pemikiran Ekonomi Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, Jurnal Usuluddin*. Bil 25 (2007).
- Rini Sulistiawati. *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. Vol 8. No 3. Oktober 2012.
- Rosita Wahyuningtyas, Agus Rusgiyono, Yuciana Wilandari. *Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)*. Jurnal Gaussian. Vol 2. No 3. Tahun 2013.
- Rovia Nugrahani Pramesthi. *Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Trenggalek*.
- Sudirman, Lili Andriani. *Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi*. Jurnal Of Economics And Business Vol.1 No.1 September 2017.
- Sussy Susanti. “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel, Dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat*”. Jurnal Matematika Integratif. Vol. 9. No. 1. April 2013.
- Tannia Octasari. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2009-2013*”. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi. Vol 5. No 6. Tahun 2016.
- Tety Marini. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Berau*. Jurnal Ekonomi Keuangan. dan Manajemen. Vol 12. No 1. 2016.
- Yarlina Yacoub. *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal EKSOS. Vol 8. No 3. Oktober 2012.

Sumber lainnya (online)

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung

[http://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/sekda/Documents/8PDRBSEKD\\_A1.pdf](http://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/sekda/Documents/8PDRBSEKD_A1.pdf),  
(diunduh tanggal 02 Februari 2018).

<https://tafsirq.com> hadits nassai (diunduh tanggal 11 Oktober 18).

<https://tafsirweb.com/11394-surat-nuh-ayat-10-12> (diunduh tanggal 8 Januari 2019)



Lampiran Hasil Olah Data *Eviews 8*

Tabel 1

Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 10/22/18 Time: 22:00  
Sample: 1 42  
Included observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.084154	7.966848	0.638164	0.5272
X1	-0.586654	0.274867	-2.134321	0.0393
X2	0.916639	0.084667	10.82636	0.0000
X3	0.520304	0.517406	1.005600	0.3210

R-squared	0.756431	Mean dependent var	11.01074
Adjusted R-squared	0.737202	S.D. dependent var	0.854394
S.E. of regression	0.437995	Akaike info criterion	1.277176
Sum squared resid	7.289919	Schwarz criterion	1.442668
Log likelihood	-22.82070	Hannan-Quinn criter.	1.337836
F-statistic	39.33769	Durbin-Watson stat	1.304487
Prob(F-statistic)	0.000000		

Estimation Command:

LS Y C X1 X2 X3

Estimation Equation:

$$Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3$$

Substituted Coefficients:

$$Y = 5.08415361559 - 0.586653986827*X1 + 0.916639099291*X2 + 0.520303890908*X3$$

## Uji Hipotesis

### Tabel 2

### Uji F dan T

Dependent Variable: Y  
Method: Least Squares  
Date: 10/22/18 Time: 22:00  
Sample: 1 42  
Included observations: 42

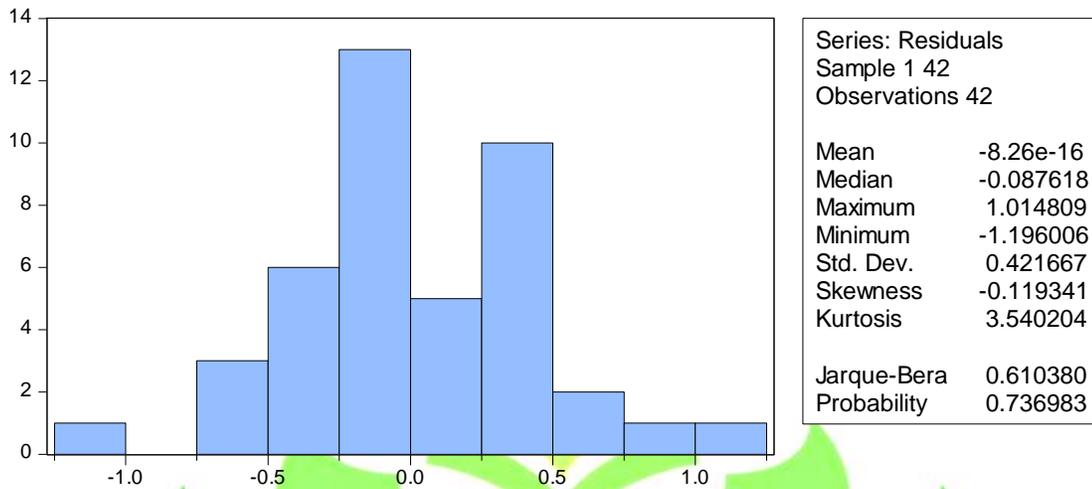
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.084154	7.966848	0.638164	0.5272
X1	-0.586654	0.274867	-2.134321	0.0393
X2	0.916639	0.084667	10.82636	0.0000
X3	0.520304	0.517406	1.005600	0.3210
R-squared	0.756431	Mean dependent var	11.01074	
Adjusted R-squared	0.737202	S.D. dependent var	0.854394	
S.E. of regression	0.437995	Akaike info criterion	1.277176	
Sum squared resid	7.289919	Schwarz criterion	1.442668	
Log likelihood	-22.82070	Hannan-Quinn criter.	1.337836	
F-statistic	39.33769	Durbin-Watson stat	1.304487	
Prob(F-statistic)	0.000000			



## Uji Asumsi Klasik

Tabel 3

### Uji Normalitas



Tabel 4  
Multikolinieritas

Variance Inflation Factors  
Date: 10/22/18 Time: 22:03  
Sample: 1 42  
Included observations: 42

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	63.47067	13895.79	NA
X1	0.075552	4720.199	1.103395
X2	0.007169	135.5198	1.080054
X3	0.267709	11702.89	1.027997

**Tabel 5**

**Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.679121	Prob. F(2,35)	0.0827
Obs*R-squared	5.443447	Prob. Chi-Square(2)	0.0658

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 10/22/18 Time: 23:14

Sample: 2 42

Included observations: 41

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002107	0.064013	-0.032916	0.9739
D(X1)	-0.007342	0.198406	-0.037003	0.9707
D(X2)	-0.027919	0.064218	-0.434749	0.6664
D(X3)	0.590275	1.904818	0.309885	0.7585
RESID(-1)	-0.382538	0.168359	-2.272160	0.0293
RESID(-2)	-0.215497	0.181794	-1.185388	0.2438

R-squared	0.132767	Mean dependent var	4.33E-17
Adjusted R-squared	0.008877	S.D. dependent var	0.399041
S.E. of regression	0.397266	Akaike info criterion	1.126036
Sum squared resid	5.523702	Schwarz criterion	1.376803
Log likelihood	-17.08374	Hannan-Quinn criter.	1.217352
F-statistic	1.071649	Durbin-Watson stat	1.978981
Prob(F-statistic)	0.392738		

## Tabel 6

### Uji Heteroskedastisitas

#### Uji Park

Dependent Variable: LOG(RES2)

Method: Least Squares

Date: 10/22/18 Time: 22:09

Sample: 1 42

Included observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42.87467	41.98091	-1.021290	0.3136
X1	3.217489	1.448397	2.221415	0.0624
X2	0.098448	0.446150	0.220662	0.8265
X3	-1.088103	2.726448	-0.399092	0.6921
R-squared	0.129796	Mean dependent var	-2.992127	
Adjusted R-squared	0.061096	S.D. dependent var	2.381904	
S.E. of regression	2.307995	Akaike info criterion	4.601028	
Sum squared resid	202.4199	Schwarz criterion	4.766520	
Log likelihood	-92.62159	Hannan-Quinn criter.	4.661687	
F-statistic	1.889309	Durbin-Watson stat	2.119901	
Prob(F-statistic)	0.147826			

**LAMPIRAN SAMPEL PENELITIAN**

**Tabel 1**  
**Data Jumlah Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**  
**Tahun 2013-2015**

No	Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
		2013	2014	2015
1	Lampung Barat	60.81	60.27	42.20
2	Tanggamus	85.64	85.02	81.60
3	Lampung Selatan	162.97	161.79	157.70
4	Lampung Timur	172.21	170.73	170.10
5	Lampung Tengah	162.81	161.55	164.40
6	Lampung Utara	142.01	140.73	140.40
7	Way Kanan	65.18	64.50	63.10
8	Tulang Bawang	33.72	36.83	44.20
9	Pesawaran	74.60	74.01	75.40
10	Pringsewu	37.31	37.77	45.60
11	Mesuji	11.23	12.79	16
12	Tulang Bawang Barat	16.43	18.73	21.80
13	Pesisir Barat	-	-	24
14	Bandar Lampung	102.75	102.27	100.80
15	Metro	17.08	16.95	16.20

**Tabel 4.2**  
**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**  
**Tahun 2013-2015 (Rupiah)**

No	Wilayah	PDRB		
		2013	2014	2015
1	Lampung Barat	12786752	13367936	13948733
2	Tanggamus	14233991	14891386	15525671
3	Lampung Selatan	23256915	24323366	25349795
4	Lampung Timur	23655372	24080118	24932145
5	Lampung Tengah	28661554	29982739	31292006
6	Lampung Utara	20146032	21179537	22205934
7	Way Kanan	16637730	17379527	18092261
8	Tulang Bawang	27667957	28791296	29827876
9	Pesawaran	20288814	21162797	21971872
10	Pringsewu	15065901	15769758	16430958
11	Mesuji	26664675	27960681	29213990
12	Tulang Bawang Barat	22072136	23051128	24063892

13	Pesisir Barat	15557275	16186787	16818258
14	Bandar Lampung	28826457	30224132	31526570
15	Metro	20024635	20914291	21803196

**Tabel 3**

**Data Penduduk Usia 15+ Yang Termasuk Pengangguran Terbuka (Jiwa)  
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015**

No	Wilayah	Penduduk Usia 15+ yang termasuk Pengangguran Terbuka (Jiwa)		
		2013	2014	2015
1	Lampung Barat	6042	5061	5539
2	Tanggamus	12864	13251	16071
3	Lampung Selatan	26313	26618	22271
4	Lampung Timur	25199	23788	22248
5	Lampung Tengah	20184	15776	18599
6	Lampung Utara	19374	16651	21307
7	Way Kanan	8731	7261	7454
8	Tulang Bawang	7994	8276	10033
9	Pesawaran	17847	16751	13544
10	Pringsewu	6392	6452	6913
11	Mesuji	7745	738	4447
12	Tulang Bawang Barat	4511	6357	3399
13	Pesisir Barat	-	-	3502
14	Bandar Lampung	43231	34844	37874
15	Metro	3055	2954	3649

**Tabel 4**

**Data Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015  
(Rupiah)**

No	Wilayah	Data Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)		
		2015	2014	2013
1	Lampung Barat	1.590.000	1.399.037	1.150.000
2	Tanggamus	1.581.000	1.399.037	1.150.000
3	Lampung Selatan	1.595.000	1.402.500	1.150.000
4	Lampung Timur	1.581.000	1.399.037	1.150.000
5	Lampung Tengah	1.588.000	1.400.000	1.154.000
6	Lampung Utara	1.581.000	1.399.037	1.150.000
7	Way Kanan	1.588.500	1.408.000	1.160.000
8	Tulang Bawang	1.588.500	1.401.000	1.155.000
9	Pesawaran	1581000	1.399.037	1.150.000
10	Pringsewu	1581000	1.399.037	1.150.000

11	Mesuji	1.581.000	1.399.037	1.150.000
12	Tulang Bawang Barat	1.581.000	1.408.000	1.150.000
13	Pesisir Barat	1.581.000	1.399.037	1.150.000
14	Bandar Lampung	1.649.500	1.422.500	1.165.000
15	Metro	1.582.000	1.400.500	1.150.000

